

RAKIT YANG BERUBAH HALUAN :

**Perubahan Sikap Politik dan Orientasi Ekonomi
Orang Cina di Palembang Pada Masa Revolusi
Suatu Kajian Sejarah Sosial**



**JUMHARI
ERRIC SYAH**

**Direktorat
Kebudayaan**

**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL PADANG**

2008

303 - 8

JUM

r

**RAKIT YANG BERUBAH HALUAN :
PERUBAHAN SIKAP POLITIK DAN ORIENTASI EKONOMI
ORANG CINA DI PALEMBANG PADA MASA REVOLUSI,
SUATU KAJIAN SEJARAH SOSIAL**



**Oleh
Jumhari
Erric Syah**

**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISONAL
PADANG
2008**

**Rakit Yang Berubah Haluan :
Perubahan Sikap Politik Dan Orientasi Ekonomi Orang
Cina Di Palembang Pada Masa Revolusi,
Suatu Kajian Sejarah Sosial.**

Penulis : **Jumhari
Erric Syah**

Editor : **DR. Mhd. Nur, M.S**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang :

Gambar : Penulis
Disain Cover : Erric Syah
Layout : CV. FAURA ABADI
I S B N : 978-979-9388-84-1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, laporan penelitian ini dapat dislesaikan dengan baik. Penelitian tentang “Rakit yang Berubah Haluan : Perubahan Sikap Politik dan Orientasi Ekonomi Orang Cina di Palembang Pada Masa Revolusi, Suatu Kajian Sejarah Sosial” merupakan upaya rekonstruksi sejarah sosial ekonomi terkait dengan permasalahan hubungan antara kelompok etnik Cina di Palembang dengan penguasa baik Republik maupun Belanda pada masa revolusi, yang didalamnya mencakup beberapa hal seperti; pasang-surut sejarah hubungan Orang Cina dengan Palembang, munculnya kekerasan anti Cina Palembang, serta terjadinya perubahan sikap politik dan perilaku dagang kelompok etnik pada periode ini

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nurmatias, selaku Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan pengumpulan data hingga selesainya laporan penelitian ini terutama kepada para narasumber seperti, Bapak Hambali Hasan, Bapak Johan Hanafiah, Ibu Bapak Kohar, serta rekan-rekan sejawat yang telah banyak memberikan dukungan moril.

Akhir kata *tak ada gading yang tak retak*, penulis mohon kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Semoga hasil laporan penelitian memberi manfaat kepada kita semua.

Padang, 16 Juni 2008
Ketua Tim,

Jumhari
NIP.132259117

SAMBUTAN DIREKTUR TRADISI

Diiringi puji syukur, saya menyambut gembira atas terbitnya buku tentang "Rakit Yang Berubah Haluan : Perubahan Politik dan Orientasi Ekonomi Orang Cina di Palembang pada Masa Revolusi Suatu Kajian Sejarah Sosial". Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh staf fungsional BPSNT Padang. Dalam buku ini diungkapkan berbagai persoalan hubungan etnis Cina di Palembang dalam konteks hubungannya dengan penguasa baik pemerintah Republik Indonesia dan Belanda pada masa revolusi. Sikap politik orang Cina yang cenderung ambivalen pada masa itu, menyebabkan mereka berada dalam pusaran "tarik-menarik" antara memihak pemerintah Republik Indonesia atau tetap setia dengan bekas majikan mereka (Belanda).

Penelitian ini mengungkapkan pula tentang betapa kompleks dan rumitnya persoalan hubungan penguasa dengan kelompok etnis Cina sebagai akibat warisan politik diskriminatif pemerintah kolonial dimasa sebelumnya. Fragmentasi sikap politik dan orientasi ekonomi orang Cina juga tidak terlepas dari konflik kepentingan antara mereka dengan pihak yang sedang berkuasa, serta usaha mempertahankan kepentingan perdagangan (ekonomi) mereka selama periode ini.

Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan pemikiran pembaca dalam memahami bermacam-macam budaya yang ada di masyarakat Sumatera Barat.

Jakarta, 16 Juni 2008
Direktur Tradisi
Direktorat Jenderal Nilai Budaya
Seni dan Film



I Gusti Nyoman Widja, SH
NIP. 130 606 820

DAFTAR TABEL

Tabel :		Hal
1.	Penduduk berdasarkan etnik di Palembang 1930.....	22
2.	Perusahaan Kapal Cina - Palembang	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar :		Hal
1.	Peta alur sungai di Palembang tahun 1819.....	16
2.	Rumah kapiten Cina-Palembang di Kampung 7 Ulu.....	51

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
G. <i>Output</i>	12
H. <i>Outcome</i>	13
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II	
PALEMBANG PADA MASA REVOLUSI	15
A. Topografi, Geografi, Demografi dan Struktur Sosial Masyarakat Palembang	15
B. Masa Pendudukan Singkat Jepang di Palembang	25
C. Proklamasi Kemerdekaan dan Respon Penguasa Lokal	32
D. Reorganisasi dan Restrukturasi Bidang Politik dan Keamanan	35
E. Kedatangan NICA di Palembang dan Implikasinya di Palembang	39

BAB III	RELASI ORANG CINA DAN PENGUASA DI PALEMBANG PADA MASA REVOLUSI	
	A. Pasang Surut Hubungan Orang Cina dengan Palembang	41
	B. Hubungan Orang Cina dengan Republik Indonesia	52
	C. Hubungan Orang Cina dengan Belanda	54
BAB IV	PERUBAHAN SIKAP POLITIK DAN ORIENTASI EKONOMI ORANG CINA DI PALEMBANG PADA MASA REVOLUSI	57
	A. Aksi Kekerasan Anti Cina	57
	B. Perubahan Sikap Politik Orang Cina	60
	C. Pola Dagang dan Peran ekonomi Cina di Palembang	62
BAB V	KESIMPULAN.....	67
	DAFTAR PUSTAKA	69
	LAMPIRAN	72

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diskursus mengenai relasi antara kelompok etnik Cina di tanah air Indonesia dengan masyarakat pribumi dan pemerintahan yang sedang berkuasa, senantiasa menarik untuk diperbincangkan karena terkait dengan kepentingan ekonomi dan sikap politik dimana mereka berada. Seolah sudah menjadi takdir yang harus diterima manakala muncul krisis ekonomi ataupun politik yang bermuara pada munculnya konflik sosial. Orang Cina acapkali menjadi sasaran dan tumbal kemarahan serta kekecewaan dari kelompok pribumi. Kelompok ini seolah menjadi sasaran tembak dan selalu menjadi pihak yang “dikambing hitamkan” terhadap berbagai ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat.¹

Masa revolusi merupakan periode yang penuh gejolak dan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi, tak terkecuali bagi orang Cina yang memegang kendali perekonomian di Indonesia. Pada masa ini, orang Cina yang bergelut di dunia bisnis dan perdagangan menghadapi dua penguasa yang saling berebut pengaruh baik secara politik maupun ekonomi, yakni antara pemerintah RI dan pemerintah Belanda yang berusaha kembali menegakkan politik imperialismenya di Indonesia. Posisi

¹ Dalam sejarah kerusuhan rasial yang melibatkan etnik dengan kelompok pribumi di Indonesia, faktor ekonomi selalu dijadikan alasan utama munculnya kerusuhan, meskipun tidak mengabaikan faktor lain seperti politik maupun sosial budaya. Orang Cina selalu menjadi korban dan seolah dianggap wajar, baik oleh kelompok pribumi maupun para penguasa seperti kasus pembantaian Cina di Batavia tahun 1740 oleh pemerintah VOC, uraian lengkapnya lihat karya Leonard, Blusse, *Persekutuan Aneh, Pemukim Cina, Wanita Perakan dan Belanda di Batavia VOC*, Yogyakarta: LKIS, 2004. Untuk periode awal abad XX kerusuhan Cina dengan kelompok pribumi, lihat karya Takashi Shiraishi, “Zaman Bergerak”, *Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta: Grafiti Press, 1997. Karya ringkas yang cukup lengkap mengenai tema ini dengan cakupan wilayah yang lebih luas dapat dibaca dari artikel Leo Suryadinata” Aksi anti Cina di Asia Tenggara, Upaya Mencari Penyebab dan Pemecahan dalam (Dewi Fortuna dkk, ed), *Konflik Kekerasan Internal, Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*, Jakarta: Yayasan Obor, LIPI dan KITLV Press, 2005, hal.173-185.

kelompok ini serba dilematis diantara pilihan sikap politik dan kepentingan ekonominya dimana mereka berada. Daerah Palembang merupakan salah satu medan pertarungan politik dan ekonomi diantara para penguasa, yang secara langsung berpengaruh pada eksistensi kelompok Cina pada masa ini. Hal ini bisa dipahami mengingat Palembang sebagai kawasan ekonomis yang strategis di luar Jawa telah memiliki jaringan hubungan ekonomi yang bersifat lintas negara-transnasional-dengan Singapura sebagai bandar transito di Asia Tenggara.

Masa transisi dalam sebuah pemerintahan sering kali menimbulkan ketegangan sosial yang pada akhirnya bermuara kepada konflik antara pribumi dengan non pribumi (Cina), sebagaimana sinyalemen Lindayanti mengenai konflik SARA di beberapa wilayah Indonesia pada periode menjelang runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998, khususnya di pulau Jawa (Jakarta dan Solo) serta di Palembang pada masa revolusi.²

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ternyata berdampak luas, tidak saja menghapuskan kelompok pribumi dari penindasan kaum penjajah, akan tetapi juga memporak-porandakan bangunan sosial yang ada sebelumnya, seperti terhapusnya strata masyarakat kolonial berdasarkan ras, termasuk berubahnya posisi etnik Cina di Indonesia, yang semula merasa lebih tinggi kedudukannya ketimbang kelompok pribumi.

Pada masa kolonial Belanda dengan penerapan kebijakan politik segregasi sosial (*regering almanak* 1854) yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan kolonial. Dimana masyarakat Hindia Belanda dikelompokkan berdasarkan stratifikasi sosial yang timpang, kelompok warga kelas satu ditempati oleh orang-orang Eropa, kelompok kedua mereka yang disebut orang Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) termasuk Cina, Arab dan orang Asia lainnya, sedangkan mayoritas pribumi dalam strata yang paling bawah.³

² Lindayanti, "Komunitas Orang Cina di Palembang pada Awal Kemerdekaan Indonesia 1945-1950 dalam Edy Sedyawati dan Susanto Zuhdi (ed), *Arung Samudra, Persembahan Memperingati Sembilan Windu A.B. Lopian*, Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lemlit UI, 2001, hal. 421-433.

³ W. F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, hal. 106-107.

Kondisi ini semakin kokoh dengan adanya pengelompokan hunian (pemukiman) berdasarkan kelompok etnik tertentu. Maka di kota-kota besar di Indonesia pada masa kolonial, seperti Batavia, Semarang termasuk Palembang dijumpai nama-nama kampung berdasarkan kategori tersebut diatas, seperti Kampung Cina, Kampung Arab, Kampung Jawa, Kampung Bugis dan Kampung etnik lainnya, yang mencerminkan pemisahan secara fisik.⁴

Perubahan konstelasi politik di Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945, tentunya berpengaruh pada kehidupan sosial politik dan ekonomi orang Cina di Indonesia, seperti identifikasi diri, sikap politik dan kepentingan ekonomi mereka. Persoalan identifikasi diri terhadap negara tempat mereka bermukim merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh orang-orang Cina perantauan, sebagaimana dikemukakan oleh Leo Suryadinata.⁵ Persoalan berikutnya muncul, meskipun orang Cina yang telah lama tinggal di Indonesia dan sudah meninggalkan identitas kecinaanya serta mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari masyarakat pribumi. Akan tetapi hal itu bukan berarti dengan sendirinya, mereka sudah dianggap sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia.

Selama ini kita melihat bahwa orang Cina yang ada di Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang homogen, Padahal tidak demikian, mereka berasal dari tempat dan suku bangsa yang berbeda. Pada umumnya orang Cina yang bermigrasi ke Indonesia berasal dari daerah Fukien dan Kwantung (Cina bagian Selatan). Akan tetapi orang Indonesia menggolongkan mereka kedalam dua golongan yakni *peranakan* dan *totok*⁶

⁴ Mona Lohanda, *The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001, hal. 1-35. Konsentrasi pemukiman Cina Palembang berada di Kampung 7 Ulu, 10 Ulu, sedangkan orang Arab tinggal di kampung 12 Ulu, 13 Ulu serta 14 Ulu.

⁵ Hari Poerwanto, *Orang Cina Khek dari Singkawang*, Depok: Komunitas Bambu, 2005, hal. 1.

⁶ Puspa Vasanty, " Kebudayaan Orang Tionghoa di Indonesia ", dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1988, hal. 353-354. Terminologi *totok* dan *peranakan* bukan hanya berdasarkan kelahiran saja, artinya Cina *Peranakan* bukan hanya orang

Orang Cina *totok* pada umumnya lebih menganggap diri mereka sebagai bagian dari bangsa Cina, sedangkan orang Cina *Peranakan* terbagi antara golongan “integrasi” dan “asimilatif”. Golongan integrasi lebih bersikap mempertahankan dan memelihara identitasnya sebagai Cina *peranakan*, sedangkan golongan asimilatif mengingkingkan peleburan minoritas Cina dalam masyarakat pribumi.⁷

Nasionalisme Cina yang muncul pada awal abad ke XX di Hindia Belanda mendorong komunitas Cina menggabungkan kelompok mereka dalam suatu organisasi yang disebut *Tiong Hoa Hwee Koan* (THKK-perhimpunan Tionghoa) yang mendirikan sekolah dengan pengantar bahasa Cina di seluruh Jawa. Pembentukan THKK disusul dengan munculnya surat kabar Cina peranakan berbahasa Melayu Cina seperti *Li Po* (1901, Sukabumi), *Chabar Perniagaan* (1903, Batavia) *Pewarta Soerabaia* (1902, Surabaya) dan *Djawa Tengah* (Semarang, 1909).⁸ Pada tahun 1927 didirikan *Chung Hua Hui*, organisasi yang dimotori oleh kelompok cendekiawan peranakan yang memperoleh pendidikan Belanda, organisasi ini mewakili orang Cina di Volksraad.

Ambiguitas sikap politik orang Cina di Indonesia pada awal kemerdekaan, merupakan warisan sejarah sebagai akibat penerapan kebijakan politik kewarganegaraan yang bersifat *bipatride* (berkewarganegaraan ganda) yang menimpa mereka. Status kewarganegaraan Cina yang tinggal di Hindia Belanda berdasarkan asas *Ius Soli*, menurut Undang-Undang tentang Kawula Negara Belanda (*Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap*) tahun 1910, yang menyatakan orang Cina tinggal di Hindia Belanda merupakan kawula Belanda. Kebijakan ini muncul sebagai reaksi dari Undang-Undang Kebangsaan yang

Cina yang lahir di Indonesia, hasil perkawinan campuran antara orang Cina dengan orang Indonesia, sedangkan *Totok* bukan hanya orang Cina yang lahir di daratan Cina. Penggolongan tersebut menurut Vasanty juga menyangkut soal derajat penyesuaian dan akulturasi dari para Cina perantau itu terhadap kebudayaan Indonesia.

⁷ Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: Grafiti Pres, 1986, hal. 50-51.

⁸ Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986, hal. 22-23

dikeluarkan pemerintahan Kaisar Cina pada tahun 1910, yang menganggap bahwa setiap anak yang lahir dari orang tua yang beretnik Cina secara otomatis berkebangsaan Cina (asas *lus Sanguinis*).⁹ Dari sinilah bibit awal munculnya kontroversi terhadap etnik Cina Indonesia, yang akhirnya membuat mereka bersikap ragu dalam menentukan sikap politik mereka setelah kemerdekaan Indonesia.

Sikap politik orang Cina yang cenderung ambivalen pada awal kemerdekaan membuat posisi mereka berada dalam pusaran - tarik-menarik - antara mendukung pemerintah RI atau masih menjaga kesetiaan tradisionalnya kepada bekas majikan mereka (Belanda). Ketidakjelasan sikap politik orang Cina berakibat munculnya kecurigaan dari kaum Republik terutama kepada kelompok Cina yang bekerjasama dan dimanfaatkan oleh pihak Belanda pada periode ini. Sebagai akibat prasangka tersebut orang Cina menjadi korban dari tindakan kekerasan sosial seperti yang terjadi di Tangerang dan Kebumen 1946 serta di Palembang tahun 1947. Gerakan anti Cina di Palembang pada awal Januari 1947 menelan korban 250 orang terbunuh dan 600 orang dinyatakan hilang.¹⁰

Peristiwa awal Januari yang lebih dikenal sebagai "Pertempuran Lima Hari Lima Malam" merupakan pertempuran yang terjadi pihak Republik dengan tentara NICA, kiranya telah mengubah sikap kelompok-kelompok Cina di Palembang. Sebagian tokoh masyarakat Cina Palembang yang lolos dari pertempuran tersebut banyak yang melarikan diri ke Singapura segera membentuk sebuah perhimpunan yang dinamakan *Himpunan Persahabatan Cina Palembang* (HPCP). Sedangkan mayoritas kelompok Cina yang tinggal di Palembang bersikap netral ditengah ketidakpastian. Meskipun begitu ada beberapa segelintir kelompok Cina yang mulai bersikap pro Republik.¹¹

Para pengungsi Cina Palembang yang lari ke Singapura, menjadikan kota ini sebagai basis konsolidasi dan perlawanan mereka terhadap pemerintah Belanda. Singapura menjadi pilihan

⁹ *Ibid.*, hal. 41.

¹⁰ Lindayanti, *Op.cit.*, hal. 423.

¹¹ Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900- 1950*, Jakarta: LP3ES,, hal. 497.

tepat bagi kelompok pelarian Cina Palembang, selain sebagai kota pelabuhan- bandar perdagangan- terpenting di wilayah perairan Malaka, kota ini juga berada diluar kontrol kekuasaan Belanda. Peristiwa tahun 1947 juga memunculkan bentuk kerja sama antara penguasa dengan pedagang Cina, antara pemerintahan Republik dengan pengusaha Cina yang sebagian dari kaum *totok* selama masa revolusi, seperti tercermin dalam bentuk penyelundupan-penyelundupan (perdagangan gelap) yang mempertautkan kepentingan mereka.¹²

Bertitik tolak dari uraian di atas maka penulis mengambil judul; **Rakit yang Berubah Haluan : Perubahan Sikap Politik dan Orientasi Ekonomi Orang Cina di Palembang Pada Masa Revolusi, Suatu Kajian Sejarah Sosial.** Kajian ini merupakan upaya penulis untuk memberikan gambaran awal menyangkut realitas sosial politik dan ekonomi orang Cina di Palembang pada masa revolusi sehubungan dengan terjadinya transisi dan transformasi kekuasaan pemerintahan serta implikasinya terhadap orang Cina di daerah ini. Selain itu, penulisan sejarah lokal dengan tema di atas perlu dilakukan, di tengah minimnya literatur yang mengangkat persoalan minoritas Cina di Palembang dalam konteks historiografi lokal maupun nasional.

B. Pembatasan Masalah

Penelitian ini mengambil batasan spasial, kota Palembang dan kawasan sekitarnya. Sedangkan batasan temporal dari tahun 1945 sampai 1950. Proklamasi kemerdekaan tahun 1945 dipandang sebagai titik awal bagi lahirnya orde pemerintahan baru serta terhapusnya diskriminasi sosial berdasarkan ras.

Sedangkan batasan akhir permasalahan yakni tahun 1950 yang merupakan tahun berakhirnya kekuasaan politik pemerintah kolonial Belanda di Indonesia maupun daerah Palembang sendiri. Akan tetapi batasan temporal tidaklah bersifat kaku, karena fakta dan peristiwa sejarah bagaimanapun merupakan suatu hal yang sifatnya berkesinambungan. Ada

¹² Twang Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*, diterjemahkan oleh Apri Danarto, Yogyakarta: Penerbit Niagara, 2005.

beberapa permasalahan yang cukup aktual untuk dibahas dalam kajian ini, antara lain:

- a. Bagaimana hubungan antara orang Cina di Palembang dengan pemerintah (penguasa) baik penguasa Republik dan Belanda pada masa revolusi?
- b. Sejauh mana kebijakan pemerintah (penguasa) baik penguasa Republik dan Belanda berpengaruh terhadap terhadap perubahan sikap politik dan orientasi ekonomi orang Cina di Palembang pada masa ini?

C. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan masa revolusi kemerdekaan sebagai periode transisi memiliki pengaruh penting terhadap munculnya kekacauan sosial serta konflik sosial antara kelompok pribumi dengan orang Cina di Palembang serta mengulas hubungan antara kebijakan penguasa, baik Republik maupun Belanda yang berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan politik dan ekonomi orang Cina di Palembang. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini setidaknya memberi gambaran awal mengenai kehidupan sosial politik dan ekonomi orang Cina di Palembang pada periode ini dalam perspektif lokal dan nasional.

D. Kerangka Konseptual

E.J. Hobswan menyebut sejarah sosial dengan "*societal history*" atau "*history of society*". Sejarah sosial menurut Hobswan memerlukan usaha yang membuat kerangka utuh mengenai masyarakat, dengan kata lain yang total atau global sejarah masyarakat secara keseluruhan.¹³

Berkaitan dengan penulisan sejarah sosial sebagaimana dikatakan oleh Hobswan, perlu adanya sebuah model yang akan memberikan inspirasi heuristik yang berguna dalam pencarian dan pengumpulan bahan serta penyusunan. Sekalipun model yang dipakai tidaklah formal dan terperinci strukturnya, setidaknya sebagai sebuah kerangka akan tampak lingkaran pusat

¹³ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994, .hal.42

(*central nexus*) atau lingkaran hubungan dari permasalahan yang akan digarap.

Dalam konteks penelitian mengenai “Rakit yang Berubah Haluan : Perubahan Sikap Politik dan Orientasi Ekonomi Orang Cina di Palembang Pada Masa Revolusi, Suatu Kajian Sejarah Sosial”, pendekatan yang bersifat sinkronik dan diakronik bersifat saling melengkapi. Penggunaan ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, politik dan ekonomi bersinergi dengan ilmu sejarah, sebab bagi sejarawan penganut mazhab *Annales* melihat substansi masa lalu masyarakat dalam konteks *structure* dan *conjuncture*.¹⁴

Model penulisan sosial menyangkut “Rakit yang Berubah Haluan: Perubahan Sikap Politik dan Orientasi Ekonomi Orang Cina di Palembang Pada Masa Revolusi, Suatu Kajian Sejarah Sosial”, penulis menggunakan model evolusi sebagaimana pembagian model penulisan sejarah sosial oleh Kuntowijoyo.¹⁵ Model evolusi melukiskan perkembangan sebuah masyarakat itu berdiri sendiri sampai menjadi kompleks. Model ini juga melihat pasang-surut perkembangan suatu komunitas dalam konteks perubahan zaman, termasuk didalamnya perubahan konstelasi politik dan ekonomi dalam masyarakatnya.

Dalam penelitian penulis menggunakan konsep perubahan yang dikehendaki (*intende-change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned change*) yakni merupakan perubahan yang diperkirakan atau telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan *agent of change*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.

¹⁴ *Ibid.*, hal 45.

¹⁵ Kuntowijoyo menyebut ada 6 model penulisan sejarah yakni: 1) model evolusi, 2) model lingkaran konsentris, 3) model interval, 4) model tingkat perkembangan, 5) model jangka panjang-menengah-pendek dan 6) sistematis

E. Tinjauan Pustaka

Leo Suryadinata dalam karyanya, “ *Dilema Minoritas Tionghoa* ”,¹⁶ menguraikan secara panjang lebar persoalan pribumi dan non pri serta berbagai kebijakan penguasa terhadap keberadaan kelompok ini di Indonesia sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karya ini cukup otoritatif untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan politik penguasa baik pemerintah kolonial maupun RI. Aspek yang menjadi kajian utama dari karya Suryadinata adalah posisi dan hubungan kelompok Minoritas Tionghoa dalam konteks politik, ekonomi dan sosial budaya terkait konstelasi kekuasaan pemerintah. Karena sifat kajiannya yang bersifat umum dan nasional, sehingga mengabaikan karakteristik budaya lokal dari masing-masing daerah di Indonesia seperti Palembang yang tentu akan berbeda dengan kultur Jawa.

Karya kedua dari Makmun Abdullah dkk, “ *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri* ”¹⁷, terutama pada Bab II sub Bab 6 mengenai, “*Kegiatan Ekonomi dan Pendidikan*”, memaparkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Palembang pada permulaan abad ke-20 sampai masa revolusi fisik, peran etnik Cina sebagai kelompok minoritas yang menguasai bidang ekonomi dibahas, akan tetapi persoalan menyangkut kehidupan sosial politik dan ekonomi tidak dijelaskan, mungkin karena sejak awal penelitian ini lebih menfokuskan pada kegiatan perdagangan dan industri di Palembang secara umum

Buku ketiga, “ *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa* ”¹⁸, kumpulan tulisan para pakar yang cukup intens mengulas masalah Cina yang tergabung dalam Lembaga Studi Realino, setidaknya beberapa artikel dalam buku ini memaparkan berbagai persoalan mendasar dan klasik menyangkut hubungan penguasa dan pengusaha (Cina) di Indonesia.

¹⁶ Leo Suryadinata, , *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: Grafitipers,1986.

¹⁷ Makmun Abdullah dkk, *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*, Jakarta: Depdikbud, Proyek IDSN, 1984/1985.

¹⁸ Lembaga Studi Realino, *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha*, Yogyakarta: Kanisius, 1986.

Nilai plus buku ini paling tidak terletak pada ulasan menyangkut nilai-nilai filosofi dasar kepercayaan etnik Cina yang menjadi acuan moralitas dalam kegiatan perdagangan. Sama halnya dengan beberapa buku yang membahas minoritas Cina, kelemahan mendasar buku ini ulasannya cenderung subyektif, meskipun mengutip sumber dan fakta sejarah yang cukup kredibel.

Keempat buku karya Kemas Ari, "*Masyarakat Tionghoa Palembang, Tinjauan Sejarah Sosial (1823-1945)*"¹⁹, mengulas keberadaan orang-orang Cina di Palembang dari aspek sejarah dan sosial budaya seperti pola pemukiman, pola kepemimpinan, religi sampai ke masalah bahasa. Sayangnya pemaparan dan analisa penulis tidak menyinggung persoalan bagaimana posisi kelompok ini dalam konteks masa transisi pemerintahan.

Kelima artikel Lindayanti, "Komunitas Orang Cina di Palembang pada Awal Kemerdekaan Indonesia 1945-1950 dalam Ed Sedyawati dan Susanto Zuhdi (ed), *Arung Samudra, Persembahan Memperingati Sembilan Windu A.B. Lopian*"²⁰ Karya ini meskipun bersifat ulasan singkat, akan tetapi cukup memberikan gambaran mengenai kondisi dan posisi komunitas Cina di Palembang pada revolusi. Singkat.

Buku keenam, karya Mestika Zed, "*Kepialangan Politik dan Revolusi*", *Palembang 1900-1950*,²¹ buku ini merupakan Disertasi Mestika Z, fokus utama dari obyek kajian buku ini adalah menyoroti masalah kepiialangan politik dan revolusi di Palembang tahun 1900-1950. Meskipun tema utama buku ini menyangkut peran fungsional pialang (broker) yang terkait dengan konstelasi politik dan ekonomi berbagai kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Palembang dari permulaan abad ke-20 sampai masa revolusi. Dalam buku ini

¹⁹ Kemas Ari, *Masyarakat Tionghoa Palembang, Tinjauan Sejarah Sosial (1823-1945)*, Palembang: Forum Pengkajian Sejarah Sosial dan Budaya, 2003

²⁰ Lindayanti, "Komunitas Orang Cina di Palembang pada Awal Kemerdekaan Indonesia 1945-1950 dalam Ed Sedyawati dan Susanto Zuhdi (ed), *Arung Samudra, Persembahan Memperingati Sembilan Windu A.B. Lopian*, Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lemlit UI, 2001

²¹ Mestika Z, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta:LP3ES, 2003.

juga dibahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan jaringan perdagangan Cina di Palembang pada permulaan abad ke-20 sampai periode revolusi termasuk pasang-surut hubungan pengusaha Cina dengan penguasa.

Buku terakhir karya Twang Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*.²² Karya Twang Peck Yang merupakan karya yang cukup otoritatif dan lengkap dalam mengulas pergulatan etnik Cina dalam dunia perdagangan di tanah air. Dalam buku juga diuraikan secara panjang lebar pasang surut, jatuh bangun kelompok usaha dan posisi mereka terhadap penguasa Karena sifatnya yang nasional serta umum, maka pembahasan mengenai aspek kelokalan-konteks Palembang-tidak diulas secara mendalam.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan metode sejarah kritis. Metode sejarah kritis adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan dengan menempuh proses yang disebut historiografi (Louis Gottshalk, 1986 : 32). Metode penelitian tersebut terdiri dari beberapa tahapan. Dimana antara tahapan permulaan dengan tahapan berikutnya saling berkaitan satu sama lain. Secara garis besar tahapan dalam metode sejarah terdiri dari 4 tahap, yaitu :

- a. Pencarian dan pengumpulan sumber data (heuristik), baik yang berupa sumber-sumber tertulis maupun sumber-sumber lisan, baik yang bersifat sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dengan melacak arsip maupun dokumen yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh penulis, yakni dengan melakukan studi perpustakaan (*library research*) dengan mengunjungi berbagai perpustakaan yang terdapat di Kota Palembang seperti; Perpustakaan Wilayah Propinsi

²² Twang Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*, diterjemahkan oleh Apri Danarto, Yogyakarta: Penerbit Niagara, 2005.

Sumatera Selatan, UNSRI, Dinas Pendidikan Nasional serta instansi terkait lainnya, maupun melacak data tersebut ke ARNAS dan Perpustakaan Nasional di Jakarta. Sedangkan sumber lisan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada para nara sumber memiliki otoritas yang berkaitan dengan tema penelitian diatas. seperti sejarawan, mantan pejuang, tentara, masyarakat umum dan orang di Cina Palembang serta menjanging informasi dari lapangan dari pihak yang terkait dengan menggunakan pendekatan “*anilisis life history* “²³ dalam kaidah Ilmu Antropologi atau *oral history*²⁴ (sejarah lisan) dalam perspektif Ilmu Sejarah.

- b. Kritik, yaitu tahap penyeleksian sumber-sumber sejarah. Meliputi kritik *eksteren* dan kritik *interen*. Kritik *eksteren* ini dilakukan untuk menguji tingkat keabsahan sumber (*otentisitas* sumber) sedangkan kritik *interen* dilakukan untuk menguji tingkat kepercayaan sumber (kredibilitas sumber)
- c. *Interpretasi*, yaitu tahap penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah diseleksi melalui upaya analisa dan sintesa fakta-fakta sejarah.
- d.. *Historiografi*, yaitu tahap penulisan sejarah. Pada tahap terakhir ini akan dilakukan koreksi baik secara bertahap maupun secara total. Metode koreksi bertahap dan koreksi total diterapkan guna menghindari kesalahan-kesalahan yang sifatnya *substantial*, sehingga menghasilkan penulisan sejarah analitis struktural yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Output

Dari hasil penelitian mengenai “Rakit yang Berubah Haluan : Perubahan Sikap Politik dan Orientasi Ekonomi Orang Cina di Palembang Pada Masa Revolusi , Suatu Kajian Sejarah

²³ Koentjaraningrat, “*Metode Penggunaan Data Pengalaman Individu*” dalam *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Penyunting Koentjaraningrat), Jakarta: PT Gramedia, 1986, hal 158-172.

²⁴ Terry Bigalke, “*The Oral History Methode*”, dalam *Sejarah Lisan*, Jakarta : Lembaran Berita ARNAS RI, No.9 Oktober 1982, hal 77-83.

Sosial”, diharapkan akan tersusun sebuah laporan penelitian dengan tema seperti tersebut diatas.

H. Outcome

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada para *stakeholder*, masyarakat pemerhati sejarah dan budaya serta instansi terkait yang memiliki perhatian dan peduli pada sejarah dan budaya lokal. Dari hasil penelitian ini, pada gilirannya akan menghasilkan berbagai temuan dan munculnya gagasan atau ide baru mengenai persoalan kebijakan pemerintah dan manajemen pengelolaannya terkait dengan persoalan hubungan antara masyarakat lokal dengan warga keturunan Cina di Palembang, yang bisa dirumuskan melalui kegiatan berupa seminar atau diskusi, seperti:

- a. Kebijakan politik dan pengelolaan masyarakat Palembang yang majemuk, perspektif kelampauan dan prospek kedepannya.
- b. Refleksi historis pengelolaan potensi sosial budaya masyarakat Palembang, peluang dan tantangan di masa mendatang.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian mengenai “Rakit yang Berubah Haluan : Perubahan Sikap Politik dan Orientasi Ekonomi Orang Cina di Palembang Pada Masa Revolusi, Suatu Kajian Sejarah Sosial ini diuraikan dalam lima bab. Bab pertama menjelaskan beberapa hal seperti, latar belakang, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, output, outcome, kerangka konseptual, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan mengenai Palembang pada masa revolusi, yang didalamnya tercakup; topografi, geografi, demografi dan struktur sosial masyarakat Palembang, masa singkat pendudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan dan respon penguasa lokal, reorganisasi dan restrukturisasi bidang politik dan keamanan serta kedatangan NIICA di Palembang dan implikasinya. Bab ketiga menguraikan mengenai relasi orang Cina dan penguasa, pasang surut hubungan orang Cina dengan

Palembang, hubungan orang Cina dengan Republik Indonesia serta hubungan orang Cina dengan Belanda.

Bab empat, memaparkan persoalan perubahan sikap politik dan orientasi ekonomi orang Cina di Palembang Pada masa revolusi, yang didalamnya menguraikan munculnya aksi kekerasan anti Cina, perubahan sikap politik orang Cina serta pola dagang dan peran ekonomi Cina di Palembang. Bab lima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II PALEMBANG PADA MASA REVOLUSI

A. Topografi, Geografi, Demografi dan Struktur Sosial Masyarakat Palembang

Kota Palembang merupakan kota terbesar di Sumatera Selatan dan tergolong sebagai kota tertua di Indonesia.²⁵ Riwayat kota ini setua dengan jejak peradaban yang ditinggalkannya, dimana sungai Musi yang mengalir dan membelah kota ini menjadi jantung peradaban Palembang masa lampau. Kata Palembang secara etimologi menurut terjemahan R.J. Wilkinson dalam kamusnya *A Malay English Dictionary* (Singapore :1903)²⁶ merujuk pada kata dasarnya *lembang*, memiliki makna yang berarti tanah yang berlekuk, tanah yang rendah, akar yang membengkak karena terendam lama didalam air.

Kata *lembang* menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer²⁷ berarti kerut, lekung ataupun lekuk. Arti lainnya dari kata *lembang* berarti tidak tersusun rapi atau terserak-serak. Sementara menurut bahasa Melayu Palembang berarti air yang merembes atau rembesan air. Awalan *Pa* atau *Pe* menunjukkan keadaan atau tempat, sehingga makna Palembang berarti suatu tempat yang digenangi air

Menurut Sevenhoven²⁸ Palembang berasal dari kata *lemba* yang berarti tempat tanah yang dihanyutkan ke tepi, sedangkan *Stuerlel* mengartikan sebagai tanah yang terdampar²⁹, jelasnya pengertian Palembang merujuk pada tanah yang berair. Faktanya di Palembang tercatat 117 buah anak sungai yang mengalir di tengah kota ini.

²⁵ Humas Kotamadya Palembang, *Buku Penemuan Hari Jadi Kota Palembang*, Palembang: Humas Pemkot Palembang, 1973 dikutip dari Makmun Abdullah dkk, *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*, Jakarta: Depdikbud, Ditjarahnitra, Proyek IDSN, 1984/1985, hal. 1.

²⁶ Dikutip dari Djohan Hanafiah, 1995, *Melayu-Jawa, Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 15.

²⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, 1995, *Kamus Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, Edisi kedua, hal 854.

²⁸ J.L. Van Sevenhoven, *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, Terjemahaan Sugarda Purbakawartja, Jakarta: Bhratara, 1971, hal 12

²⁹ Djohan Hanafiah, *op.cit*



Gambar. 1. Peta Alur Sungai di Ibukota Palembang Tahun 1819

Sumber: Woelders, *Het Sultanaat 1812-1815*, Amsterdam 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1975, hal. 67.

Beberapa penulis kolonial lain yang sempat mengunjungi Palembang melukiskan kawasan Palembang sebagai daerah yang selalu dikaitkan dengan ketergantungan penduduknya terhadap lalu lintas perairan sungai. Bahkan seorang koresponden surat kabar *Het Surabajasch Handelsblad* yang sempat mengunjungi daerah ini pada awal abad ke-20, menyebut kota Palembang sebagai *Venetië van Indie*.³⁰ Geografis daerah Palembang sebagian besar wilayahnya terletak di kawasan dataran rendah dengan beberapa sungai besar dan sungai kecil yang mengalir ke pantai timur pulau Sumatera. Kondisi yang demikian bukanlah khas kota Palembang saja, sebab daerah-daerah di Sumatera bagian selatan pada umumnya juga memiliki kondisi yang sama.³¹

³⁰ J.F.P, "Economische Geographie van Zuid-Sumatra, " dalam *Tijdschrift voor Economische Geographie (TEG)*, 2(1911), hal. 284. Dikutip dari Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3Es, 2003, hal. 27.

³¹ DJohan Hanafiah, *op.cit.*,

Ketergantungan penduduknya kepada sungai juga terlihat jelas dari banyaknya penduduk yang mendiami dan menjalankan aktifitas keseharian mereka yang menyandarkan pada keberadaan sungai. Arus lalu lintas orang, barang dan jasa yang menghubungkan antar kampung memanfaatkan sungai sebagai penghubungnya. Melalui sungai pula tranformasi pengetahuan, perubahan sosial serta terbentuknya masyarakat Palembang yang bercorak kosmopolitan terbentuk serta menampakkan wujudnya sampai sekarang.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Palembang terletak di kaki Bukit Siguntang, dimana posisinya sebelah menyebelah dengan Sungai Musi. Secara astronomi Palembang berada pada 2° 58' LS dan 105° BT. Daerah ini sebagaimana mana halnya dengan wilayah lain Nusantara beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 2663 mm dan beriklim lembab.³² Dalam bulan-bulan Mei, Juni dan Juli angin bertiup dari arah Tenggara dan Timur, pada periode ini cuaca dalam keadaan baik. Air pasang mulai datang pada pertengahan bulan Mei dan berlangsung terus sampai pertengahan bulan November. Selebihnya dari bulan-bulan itu setiap tahunnya tidak ada air pasang, hanya ada air surut karena pada periode ini air dari daerah pedalaman mengalir sangat deras. Sehingga tidak mengherankan kalau keadaan ibukota Palembang dipengaruhi oleh adanya pasang surut ini. Karena adanya pasang surut ini permukaan kota Palembang sering mengalami naik turun air dari 10 sampai 16 kaki.³³

Kota Palembang berada kira-kira 15 mil dari muara sungai Musi yang berujung di dekat Sungsang. Letak ini tampaknya telah dipilih dengan bijaksana, mengingat alur Sungai Musi yang lebar dan berhulu di kawasan pedalaman mampu dilayari oleh kapal-kapal besar. Selain itu Palembang berada 1 mil dari pertemuan Sungai Musi dengan sungai-sungai Ogan dan Komerang yang berhulu di daerah pedalaman.³⁴

³² D.G. Stibbe, *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, Jilid III (cetakan ke-3), 's Gravenhage, Leiden, 1919, hal 270.

³³ J.L. van Sevenhoven, *op.cit.*, , hal 11-13

³⁴ *Ibid.*,

Berbicara geomorfologi Sumatera Selatan, tidak akan terlepas dari struktur geologi pulau Sumatera secara keseluruhan. Kawasan ini pada umumnya memiliki gunung berapi yang masih aktif, sedangkan sisa satu-satunya erupsi muda hanyalah terdapat di bagian Selatan, yang saat ini menjadi lapisan sukadana basalt. Kawasan ini pada masa pleotosin mengalami pelengkungan yang kemudian patah secara *longitudinal*, sehingga patahan sekarang menjadi lembah Semangko yang memanjang dari Teluk Semangko menuju ke bagian Utara sampai ke Sumatera Tengah.³⁵ Di bagian pantai Barat terdapat dataran aluvial yang sempit dan berkelok-kelok, sementara di bagian Timurnya merupakan dataran aluvial yang lebar, membentang dari ujung Sumatera Selatan sampai ke Sumatera Utara.

Morfologi kota Palembang yang terletak di pantai Timur Pulau Sumatera, pada masa tertier muda mengalami penurunan (depresi) yang lambat-laun berakibat terjadinya proses pedangkalan. Sedangkan di bagian tertentu dari kota ini berada di permukaan air laut yang terbentuk dari proses sedimentasi. Di bagian Timur Laut merupakan dataran rendah yang merupakan kawasan berawa (10-100 m), di bagian Barat Daya merupakan kawasan perbukitan yang merupakan rangkaian Bukit Barisan serta jajaran pegunungan seperti Gunung Dempo (3173 m), Gunung Seblat (2383) dan Gunung Batak (2817 m).³⁶

Berdasarkan geomorfologinya pula, karakteristik lingkungan fisik daerah Palembang secara sederhana terdapat dua pola utama yakni pola *iliran* dan *uluran*³⁷. Istilah ini merujuk pada kawasan dataran rendah dan dataran tinggi dalam terminologi masyarakat lokal Palembang. Perbedaan karakteristik wilayah pada gilirannya berimplikasi pada perbedaan sosial ekonomi dan kultur kedua pola tersebut. Klasifikasi perbedaan kedua pola di atas setidaknya mulai menemukan wujudnya pada

³⁵ Makmun Abdullah dkk, *op.cit*, hal 12-13.

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Konsep *iliran* dan *uluran* merupakan konsep zone geografis yang terbentuk dari kondisi realitas kenampakan fisik geologinya. Uraian menarik mengenai konsep ini dan pengaruhnya terhadap penduduk dapat dibaca dari buku Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003, hal; 34-47.

masa Kesultanan Palembang serta lebih intensif mengkristal ketika Palembang berada di bawah hegemoni Kolonial Belanda.

Palembang pada masa pra kolonial merupakan ibukota Kesultanan Palembang (1553-1814). Kemudian pada masa kolonial Belanda, kota tersebut dijadikan sebagai ibukota Karesidenan Palembang. Karesidenan ini merupakan satu dari tiga karesidenan yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Wilayah Karesidenan Palembang di Sebelah Barat berbatasan dengan daerah Bengkulu, dan di bagian Selatan dengan Lampung. Sedangkan bagian Utara berbagi batas dengan pantai Timur Sumatera dan provinsi tetangganya, Jambi.

Posisi geografis Palembang yang berada di dekat muara Sungai Musi serta terhubung dengan delapan anak sungai yang bermuara di sungai ini. Melalui anak-anak sungai tersebut lalu lintas perdagangan dan komunikasi antar penduduk yang tinggal di Ulu dengan Hilir terjalin. Selain itu posisi muara Sungai Musi yang menghadap ke Selat Bangka memiliki nilai strategis dan ekonomi, karena kedudukannya sebagai tempat penghubung (transit) antara Jawa dan Malaka.

Sejak dihapuskannya Kesultanan Palembang pada tahun 1825 sebagai akibat kekalahan Sultan Mahmud Badaruddin II, maka kota Palembang statusnya berubah menjadi daerah karesidenan.³⁸ Karesidenan Palembang dibagi atas beberapa *afdeeling*, kecuali ibukota Palembang. Tiap-tiap *afdeeling* membawahi *onder-afdeeling* yang dipimpin oleh *contreleur* dan tiap-tiap *onder-afdeeling* terdiri dari marga-marga yang diperintah oleh seorang kepala marga atau seiring disebut pasirah. Sedangkan ibukota Palembang sendiri dibagi dalam dua distrik yaitu Distrik Seberang Ulu dan Distrik Seberang Ilir.

Pada masa ini di wilayah Karesidenan Palembang terdapat 15 Distrik dan 40 onder-distrik yang masing-masing dikepalai oleh seorang Demang dan Asisten Demang, serta 174 marga yang terbagi dalam berbagai dusun dan kampung. Adapun pembagian *afdeeling* dan *onder-afdeeling* di Karesidenan Palembang adalah sebagai berikut³⁹: 1) Daerah Ibukota

³⁸ Makmun Abdullah dkk, *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*, Jakarta: Depdikbud, Ditjarahnitra, Proyek IDSN, 1984/1985, hal.49

³⁹ Ibid.,

Palembang terbagi dalam dua distrik, yaitu; Distrik Seberang Ilir dan Distrik Seberang Ulu, 2) *Afdeeling* Palembang Ilir atau (*Palembang Benendenlanden*) dengan ibu kotanya Sekayu, yang membawahi beberapa *onder-afdeeling*, yaitu: *Onder-afdeeling* Musi Ilir (Sekayu), *Onder-afdeeling* Banyuasin (Banyuasin dan Talang Betutu), *Onder-afdeeling* Rawas (Surulangun) dan *Onder-afdeeling* Ogan Ilir (Tanjung Raja). 3) *Afdeeling* Palembang Ulu (*Palebangsche Bovenlanden*) ibukotanya Lahat, terbagi dalam beberapa *onder-afdeeling*, yaitu: *Onder-afdeeling* Lematang Ulu (Lahat), *Onder-afdeeling* Lematang Ilir (Muara Enim), *Onder-afdeeling* Tanah Pasemah (Pagar Alam), *Onder-afdeeling* Tebing Tinggi (Tebing Tinggi) dan *Onder-afdeeling* Musi Ulu (Muara Bliti). 4) *Afdeeling* Ogan Ulu dan Komering dengan ibukota Baturaja, terbagi dalam beberapa *onder-afdeeling*, yaitu: *Onder-afdeeling* Ogan Ulu (Lubuk Batang), *Onder-afdeeling* Komering Ulu (Martapura), *Onder-afdeeling* Muara Dua (Muara Dua) dan *Onder-afdeeling* Komering Ilir (Kayu Agung).

Permulaan abad ke-20 dalam perspektif ekonomi dan politik kolonial Hindia Belanda dipandang sebagai puncak dari terwujudnya *Pax Nerlandica*.⁴⁰ Pasifikasi terhadap daerah-daerah di luar Jawa telah berakhir dan bersamaan dengan hal itu perkembangan ekonomi dan perdagangan daerah jajahan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari kebijakan politik ekonomi *neo-merkantilisme* kolonial Belanda sebagai akibat kemenangan kaum liberal di negeri Belanda pada akhir abad ke-19.⁴¹

Palembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dalam konteks kepentingan ekonomi kolonial dianggap sebagai salah satu kawasan *wingewesten* (daerah-untung) diluar pulau Jawa. Sebab Palembang pada masa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara pesat, yang ditandai dengan terbukanya Palembang sebagai kawasan eksploitasi kolonial,

⁴⁰ *Pax Nerlandica* adalah keadaan aman dan makmur untuk semua wilayah kerajaan Belanda dibawah nauangan kekuasaan pemerintahan kerjaan Belanda. Untuk jelasnya baca Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993, 37-38

⁴¹ *Ibid.*,

yakni terbukanya daerah ini bagi perkebunan (tembakau, kopi dan karet) serta mulai dilakukannya eksplorasi di bidang pertambangan (minyak bumi dan batu bara).⁴²

Sebelumnya Palembang bukanlah daerah tujuan investasi para pengusaha perkebunan (*planters*), sejauh ini minat dan prioritas mereka untuk menanamkan modalnya disektor perkebunan hanya ditujukan di wilayah Sumatera Timur. Meskipun begitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi perkebunan Palembang pada masa ini, kondisinya jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya di pulau Sumatera. Kondisi menarik kaum kapitalis Barat yang memandang kawasan ini sebagai daerah yang memiliki prospek ekonomi kedepan. Laju perkembangan ekonomi perkebunan semakin menarik perhatian kaum kapitalis Barat, apalagi sejak dilakukanya reorganisasi administratif pemerintahan pada tahun 1912-1913, yang mempermudah proses konsesi tanah *erpacht*.⁴³ Pembukaan usaha perkebunan yang pada awalnya dibuka di daerah dataran tinggi Pasemah pada tahun 1887 dengan jumlah 21 perkebunan, maka sejak adanya reorganisasi administrasi meningkat menjadi 51 perkebunan pada tahun 1916.⁴⁴

Berdasarkan Sensus penduduk tahun 1915 jumlah penduduk Palembang diperkirakan 650.000 jiwa yang terdiri dari 800 orang Eropa, 7000 orang Cina, 2.200 orang Arab dan 200 orang Keling dan sisanya pribumi.⁴⁵ Pada tahun 1930 jumlah penduduk Palembang mengalami perubahan dua kali lipat selama 15, sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini:

⁴² Mestika Z, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003, hal 67

⁴³ *Ibid.*, hal 69. Sistem *erpacht* adalah sistem sewa tanah dengan jangka waktu penggunaan selama 75 tahun. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah kolonial untuk melindungi tanah milik kaum pribumi dari serbuan pemodal asing yang ingin menanamkan kapitalnya untuk membuka usaha perbukaaan.

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*, hal 90

Tabel 1. Penduduk Berdasarkan Etnik di Palembang Tahun 1930

No.	Lokasi	Etnik				Total
		Eropa	Pribumi	Cina	Lainnya	
1.	Benedenland (Ilir)	2.557	528.705	18.922	4.285	544.469
2.	Bovenland (Ulu)	1.117	25.773	5.523	331	332.744
3.	Ogan dan Komering	153	207.489	1.621	79	209.342
Total		3.287	1.061.967	26.066	4.695	1.096.565

Sumber: Indisch Verslag, 1931: 13, dalam Mestika Z, *The Dualistic Economy of Palembang in the late Colonial Period*, editor Thomas J. Lindblad, *Historical foundation of a national economy in Indonesia, 1890s-1990s*, North-Holland, Amsterdam/Oxford/New York/Tokyo: Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen Verhandelingen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 167, 1996, hal. 250

Dari tabel diatas, dapat dilihat perbandingan penduduk Palembang dari 650.000 jiwa pada tahun 1915 menjadi 1.096.565 jiwa, yang berarti penduduk Palembang meningkat dua kali lipat selama 15 tahun. Berdasarkan tabel diatas pula, daerah yang jumlah penduduknya terbesar adalah daerah Ilir yakni 544.469 orang, jumlah penduduk yang tinggal di kawasan ini sekitar dua kali lipat dari penduduk yang tinggal di Ogan dan Komering yang berjumlah 209.342 orang

Berdasarkan posisi geografisnya pula, maka landscape budaya masyarakat Palembang lebih cenderung berorientasi kepada kebudayaan sungai (*riverine culture*). Ada satu segi menarik akibat orientasi budaya Palembang tersebut, yakni lahirnya budaya material maupun non material yang terkait dengan hal tersebut. Pada masa Kesultanan Palembang, perahu merupakan transportasi utama. Mereka menyebutnya *pancalang*,⁴⁶ pancalang tidak hanya bermakna fisik semata ia

⁴⁶ Ilustrasi menarik mengenai Pancalang di uraikan oleh Sevenhoven, sebagaimana halnya bentuk perahu fungsinya sebagai angkutan di daerah sungai. Hal yang terlihat istimewa, bahwa penggunaan perahu biasanya dipakai oleh kalangan tertentu dan secara simbolis warna perahu menunjukkan siapa yang berhak memakainya. Besarnya, warna dari dayungnya berbeda sesuai dengan pangkat pemiliknya. Hanya raja yang berhak memakai warna putih

juga merupakan simbol dari kebesaran para pembesar Kesultanan Palembang

Pada masa Kesultanan Palembang penduduk Palembang dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok priyayi dan rakyat. Priyayi berarti keturunan raja atau kerabat raja, golongan priyayi dibagi lagi menjadi tiga golongan yaitu; pangeran, raden dan masaagus. Pangeran berasal dari kata pengheran yang berarti yang memerintah. Gelar ini hanya boleh diberikan oleh raja. Golongan raden berarti tinggi (luhur) sedangkan masaagus berarti berharga banyak.⁴⁷ Untuk anak-anak perempuan dari keluarga priyayi mereka memiliki sebutan pula seperti; Istri Sultan gelar sebutannya ratu, kemudian untuk anak perempuan atau istri dari keluarga raden disebut raden ayu, sedangkan istri atau perempuan masaagus dipanggil asayu.⁴⁸

Golongan rakyat kebanyakan dibagi dalam tiga golongan, yakni: golongan kiai-mas, kiai-agus dan rakyat jelata. Kiai-mas adalah laki-laki dari perkawinan seorang masayu dengan laki-laki dari rakyat biasa, sedangkan Kiai-agus adalah anak laki-laki dari keturunan raden yang kawin dengan rakyat biasa. Untuk kalangan rakyat kebanyakan dibedakan atas orang Miji, orang Senan dan orang-orang yang menggadaikan diri atau budak⁴⁹

Selain penduduk pribumi pada masa Kesultanan Palembang telah tinggal orang-orang Cina dan Arab. Biasanya orang Cina tinggal di sungai-sungai dengan rumah rakitnya, sedangkan orang Arab telah mengelompok. Kedua golongan itu bergerak sebagai pedagang perantara. Tidak ada angka pasti berapa jumlah orang Cina dan Arab yang bermukim di Palembang pada masa kesultanan ini. Namun menurut taksiran

dan hitam, lainnya merah dengan baris-baris warna khusus.. Kelompok bangsawan termasuk para pangeran dan kerabat raja perahunya memakai tanda di atasnya berbentuk belah ketupat hitam. Pancalang berukuran panjang antara 40 sampai 70 dan 80 kaki, lebarnya dari 6 sampai 11 dan 12 kaki dengan jumlah pendayung antara 20-30 orang. Untuk jelasnya lihat Sevenhoven. *op.cit*, hal 16.

⁴⁷ Sevenhoven, *op.cit*, hal 36

⁴⁸ *Ibid.*, hal 26

⁴⁹ *Ibid.*,

Sevenhoven jumlah orang Arab sekitar 500 jiwa dan orang Cina 800 jiwa.⁵⁰

Pada masa kolonial Belanda terjadi perubahan yang cukup dramatis, yakni sejak dimulainya penerapan kebijakan politik segregasi rasial yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan kolonial. Masyarakat Hindia Belanda dikelompokkan berdasarkan stratifikasi sosial yang timpang, kelompok warga kelas satu ditempati oleh orang-orang Eropa, kelompok kedua orang Timur Asing seperti Cina, Arab dan bangsa Asia lainnya. Sedangkan mayoritas kelompok pribumi berada dalam strata sosial paling bawah.⁵¹

Kondisi ini semakin kokoh dengan adanya pengelompokan hunian (pemukiman) berdasarkan kelompok etnik tertentu. Maka di kota-kota besar di Indonesia pada masa kolonial seperti Batavia, Semarang termasuk pula Palembang dijumpai kampung-kampung berdasarkan kategori tersebut, seperti kampung Cina, Kampung Arab, Kampung Jawa, Kampung Bugis dan Kampung etnik lainnya, yang mencerminkan pemisahan secara fisik.⁵²

Klasifikasi sosial disertai terbentuknya hunian (pemukiman) berdasarkan etnik diperkuat pula dengan kebijakan ekonomi kolonial, dimana kelompok Timur Asing dilarang menjalankan usaha pertanian serta memiliki tanah, sementara di sisi lain mereka diberikan keleluasaan peran sebagai mediator (pedagang perantara) yang menjembatani kepentingan pribumi dengan pemerintah kolonial.⁵³

⁵⁰ *Ibid.*, hal 33

⁵¹ Pramoedya Ananta Toer, *op.cit*, hal 123-128. Baca pula, Mona Lohanda, *The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 2001. Keterangan lainnya bisa dilihat buku Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghao*, Jakarta : Graffiti Press, 1995 juga karya W.F Wertheim, *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, hal 106-107.

⁵² Berdasarkan fakta empirik dan pengamatan penulisan konsentrasi pemukiman keturunan Arab berada di Kampung 12 Ulu, 13 Ulu, 14 Ulu. Sedangkan keturunan Cina bisa ditemukan di Kampung 7 Ulu (Komplek Kapiten) serta 10 Ulu tempat kelenteng tertua Soei Goeat Kiong.

⁵³ Liem Twan Djie, *Perdagangan Perantara Distribusi Orang-Orang Cina di Jawa, Suatu Studi Ekonomi*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Wertheim menyebut mereka dengan *minoritas dagang*⁵⁴, peran istimewa yang diperoleh kelompok Cina inilah yang akhirnya menyebabkan posisi mereka seperti dua sisi ujung mata pisau. Pada satu sisi mereka diuntungkan dan disanjung oleh kaum kolonial, akan tetapi di sisi lain mereka kurang disukai oleh kelompok mayoritas pribumi.

B. Masa Pendudukan Singkat Jepang di Palembang

Masa singkat pendudukan bala tentara Dai Nippon seringkali dikatakan sebagai orde penuh ketidakpastian. Akan tetapi pada saat bersamaan dipandang pula sebagai tumbuhnya bibit nasionalisme. Masyarakat awam acap kali menilai bahwa periode 3,5 tahun penjajahan Jepang menimbulkan kesengsaraan yang lebih besar ketimbang penjajahan Belanda. Diatas itu semua lahirnya *nation state* yang bernama Indonesia tidak terlepas dari pemimpin-pemimpin pribumi seperti Soekarno dan Hatta serta pemimpin nasionalis lainnya yang pernah dan mau berkompromi dengan pemerintah pendudukan Jepang.

Dalam perspektif strategi politik-militer Jepang di Sumatera, Palembang menempati posisi yang istimewa. Ini terlihat dari cetak biru invasi Jepang ke *Nanyo* ("Kawasan Selatan"), kawasan Asia Tenggara sekarang. Sumatera bersama Semenanjung Malaya dimasukkan ke dalam daerah inti (*nuclear zone*) di kawasan selatan. Artinya kedua daerah ini menjadi prioritas invasi Jepang ke wilayah *Nanyo*. Selain karena letaknya strategis dalam konteks kepentingan politik regional Jepang di kawasan ini, juga karena daerah ini kaya akan sumber daya alam yang dapat mendukung kepentingan ekonomi perang Jepang. Sebagai bukti terlihat dari pernyataan Admiral Nakamura, seorang perwira Jepang yang pernah bertugas di Sumatera bahwa "mundur dari Sumatera berarti kehilangan Hindia Belanda secara keseluruhan". Pandangan ini tentunya secara tidak langsung mengurangi peran Jawa sebagai jantung kolonial Belanda.⁵⁵

Posisi Palembang sangat vital bagi pemerintahan Dai Nippon dengan kekayaan sumber daya alam yang dihasilkannya,

⁵⁴ W.F. Wertheim, *op.cit*

⁵⁵ Mestika Zed, *op.cit*, hal. 227-228.

seperti minyak bumi, batu bara, timah dan karet. Palembang memiliki posisi yang strategis dalam konteks militer maupun ekonomi. Secara militer, penguasaan terhadap Palembang, memiliki nilai strategis bagi Jepang, yakni mereka mendapatkan basis pertahanan yang kuat dan pijakan yang kukuh untuk mengawasi lalu lintas pergerakan pasukan sekutu yang akan mundur dari Sumatera ke Jawa atau gerak masuk bala bantuan Sekutu dari daerah-daerah di sekitar Sumatera, Singapura dan Jawa dapat dicegah.

Penyerbuan bala tentara Jepang ke Palembang bersamaan dengan penyerbuan Jepang ke Singapura pada tanggal 12 Februari 1942. Kubu pertahanan pasukan Sekutu (Belanda) di Palembang tampaknya tidak siap mengantisipasi serbuan mendadak tentara Jepang. Setelah pulau Bangka berhasil diduduki oleh bala tentara Jepang pada malam hari tanggal 12 Februari 1942. Maka berselang dua hari kemudian tentara pendudukan Jepang sudah berhasil menguasai kota Palembang.

Keadaan Palembang pada awal-awal pendudukan tentara Jepang sebagaimana tergambar dalam kutipan dibawah ini:

“Pukul setengah sembilan pagi tanggal 14 Februari 1942 balatentara Jepang mulai memasuki pinggir kota. Suara serine meraung-raung ditimpali rentetan tembakan mitraliur Jepang. Orang-orang kampung terlihat bingung dan pasrah. Pegawai dan pejabat-pejabat Belanda sibuk membakar berbagai dokumen dan arsip. Tangki-tangki minyak yang berada didalam kota diledakan. Bangunan-bangunan yang dianggap penting dibakar. Kota Palembang untuk beberapa saat diselimuti awan mendung dan tabir asap hitam. Kota yang menurut sensus penduduk tahun 1930 sekitar 110.000 orang itu semakin penuh sesak dijejali ribuan pengungsi sipil maupun militer yang mengalir dari utara. Diantara pengungsi termasuk mereka yang menyelamatkan diri dari Singapura yang datang sejak bulan-bulan terkahir menjelang perang Dunia ke-2. juga

terlihat pengungsi dari Australia, Inggris, Inggris-India dan Cina."⁵⁶

Wilayah Palembang bersama daerah Semenanjung Malaya berada dibawah penguasaan Brigade Tentara (*Riku Gun*) ke-25 yang berpusat di Singapura dengan Letnan Jendral Sakuno Todayoshi sebagai pemimpin divisi ke-38 yang bertugas menduduki Palembang. Sedangkan Jawa berada dibawah kontrol Brigade Tentara (*Riku Gun*) ke-16 yang berkedudukan di Batavia. Untuk wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat di bawah kontrol Angkatan Laut (*Kai Gun*) yang berpusat di Makasar.⁵⁷

Dalam pandangan politik Jepang, wilayah pulau Sumatera memiliki "keunikan" tertentu dibandingkan dengan Jawa. Keunikan menyangkut perbedaan internal diantara masing-masing daerah administratif di Sumatera. Dengan dasar ini pemerintahan pendudukan Jepang memberlakukan administrasi pemerintahan militer pada bulan September 1942. Perubahan yang tampak jelas adalah bahwa pemerintahan territorial Sumatera tidak lagi menjadi sub-ordinasi Jawa sebagaimana model pemerintahan Hindia Belanda.

Pemisahan administrasi pemerintahan Sumatera dari Jawa dan penggabungan daerah dengan Semenanjung Malaya memiliki landasan jelas yang mencerminkan visi Jepang mengenai peranan penting kedua wilayah ini. Bagi Jepang Sumatera adalah "daerah inti", kehilangan pulau ini berarti hilangnya kedudukan mereka di Indonesia. Secara ekonomi daerah Palembang menyediakan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, karet, batu bara serta timah yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan perang Jepang. Dari sisi militer, daerah ini merupakan kawasan yang strategis gerak pasukan lawan (*Sekutu*) yang keluar-masuk ke Selat Malaka, sedangkan pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk padat dan menghasilkan beras dengan jumlah yang cukup melimpah dimanfaatkan oleh Jepang sebagai sumber pangan dan tenaga

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 230.

⁵⁷ Makmun Abdullah, *op.cit*, hal. 55.

kerja paksa untuk proyek-proyek Jepang di dalam dan di luar pulau ini.

Pemisahan antara Sumatera dan Jawa oleh Jepang, juga didasari oleh pertimbangan lain, seperti pertimbangan kondisi politik diantara kedua wilayah tersebut diatas. Setidaknya dalam pandangan Jepang sebagaimana tercermin dalam laporan Jepang yang menyebutkan bahwa nasionalisme dan kegiatan pergerakan di Sumatera relatif kurang berkembang dibanding Jawa. Hal ini tampak dari adanya pelarangan pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pengungkapan semangat “kemerdekaan” yang semula diperbolehkan oleh pemerintah militer Jepang.

Jepang melakukan peyusunan administrasi pemerintahan militer secara permanen di Sumatera sejak bulan September 1942. Jumlah personel Jepang yang terlibat dalam pemerintahan, baik sipil maupun militer kurang lebih 75.000 orang. Sesuai dengan kepentingan perang mereka, penguasa tidak terlalu membangun birokrasi rumit sebagaimana pemerintah Hindia Belanda. Bahkan pemerintah Jepang masih mempertahankan struktur hierarki kekuasaan warisan administrasi pemerintahan Hindia Belanda, tapi dengan istilah bahasa Jepang, seperti untuk pulau Sumatera, dibagi kedalam 10 Karesidenan (*shu*), yang dikepalai oleh seorang *chokan* (residen).

Daerah setingkat *afdeeling* dan distrik pada masa pemerintahan Hindia Belanda dipimpin oleh *bunshu-co* dan *fuku-bunshu* (setingkat *onder-afdeeling*) yang dikepalai oleh *fuku-bunshu-co* serta pejabat setingkat *controlir* (*sonco*) yang semula banyak dijabat oleh orang kulit putih pada masa Hindia Belanda diganti oleh pejabat bumi putra. Dalam konteks pejabat setingkat *sonco* dijabat oleh bekas Demang atau mantan Pasirah.⁵⁸ Hampir semua pejabat pribumi dipertahankan, namun tugas mereka sekarang adalah melayani kepentingan pemerintah pendudukan Jepang. Khusus untuk kota Palembang, Jepang menciptakan sebuah struktur organisasi-*tonarigumi*-rukun tetangga. Sebab kota Palembang sebagai *gemeente* tidak menganut sistem marga sebagaimana daerah lainnya di

⁵⁸ Mestika Zed, *op.cit*, hal. 235.

Sumatera Selatan. Status kampung yang dipimpin oleh sirah kampung (*ku co*) memiliki kedudukan sejajar dengan dengan *kerio*, sedangkan rukun tetangga parallel dengan punggawa (*kumi co*).⁵⁹

Mulai bulan Mei 1943 Jepang memindahkan Markas Besar Tentara ke-25 yang berpusat di Singapura ke Bukittinggi, pemindahan ini memberikan petunjuk kuat adanya perubahan kebijakan perang di kawasan selatan. Jepang mencoba memberikan peluang yang lebih besar kepada pulau Sumatera untuk menghadapi serangan sekutu. Perubahan segera tampak adalah posisi dan kedudukan setiap *shu* terlihat "otonom". Mereka memiliki kewenangan untuk memecahkan persoalan internal mereka serta memenuhi kebutuhan ekonominya secara swasembada. Setiap *shu* di masing-masing daerah model yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Penerapan kebijakan yang terkesan seperti "politik isolasi" secara tidak langsung seperti model politik "divide et empera" kolonial Belanda.⁶⁰

Dalam konteks dinamika politik internal Sumatera, Jepang memiliki pandangan bahwa kelompok etnik Minangkabau dan Aceh memiliki kemampuan dan kecerdasan politik serta partisipasi politik yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya dibagian pulau Sumatera. Jauh sebelum invansi Jepang ke wilayah ini. Mereka telah menjalin kontak dengan organisasi PUSA (Aceh) serta Gerindo di Sumatera Barat dan Timur. Sedangkan untuk Palembang lebih diprioritaskan untuk kepentingan ekonomi perang Jepang.

Pemerintah berusaha menarik simpati masyarakat pribumi dengan memfasilitasi pembentukan organisasi politik maupun semi-militer seperti *Shu Sangi Kai* (semacam Dewan Penasehat Daerah) yang kemudian diperluas lewat organisasi *Palembang Hokokai* serta *Giyugun* dan *Heiho* untuk militer. *Shu Sangi Kai* mirip dengan *Palembangraad* ciptaan Belanda yang sepenuhnya dipegang oleh pribumi, sedangkan untuk *Shu Sangi Kai* dipegang langsung oleh Letnan Jendral H. Kasai, Gubernur Militer di Jepang.

⁵⁹ Makmun Abdullah, *op.cit*, hal. 57.

⁶⁰ Mestika Zed, *loc.cit.*,

Kapitulasi pendudukan Jepang di Indonesia termasuk di Palembang mulai memperlihatkan kemunduran pada periode akhir perang Asia Timur Raya. Sinyal mulai terjadinya kemunduran tentara pendudukan Jepang di Palembang, terlihat dari melunaknya sikap Jepang terhadap pemimpin pergerakan terlebih sejak disiarkannya pidato Perdana Menteri Koiso didepan parlemen Jepang pada 7 September 1944 dengan salah satu isinya akan memberi kemerdekaan pada waktu yang akan datang. Bahkan untuk mempertegas keinginan untuk mendapatkan serta menagih janji pemerintah para anggota *Shu Sangi Kai*, seperti A.K. Gani (wakil ketua *Shu Sangi Kai*), Ir Ibrohim (wakil *Shu Sangi Kai*), Abdul Rozak, K.H. Cik Wan dan Pangeran Cik Mat wakil dari Palembang bertemu di Bukittinggi pada tanggal 26 Juni 1945. Dalam forum tersebut mereka juga bertemu dengan tokoh-tokoh Sumatera seperti M.Syafei (Sumatera Barat), Teuku Nyak Arif (Aceh). Mr Abas (Lampung) para pengurus dewan *Shu Sangi Kai* yang diangkat oleh Jepang. Ketakutan yang berlebihan dari pihak Jepang terhadap kaum pergerakan juga terlihat pembatasan mereka terhadap kaum pergerakan untuk akses informasi seperti adanya sensor ketat terhadap pemberitaan yang berasal dari Kantor Berita Domei di Palembang.

Bagi masyarakat keturunan Cina kedatangan Jepang telah mereka antisipasi, bahkan ada beberapa pengusaha yang menawarkan tenaga mereka untuk pemerintahan baru. Tidak seperti di Malaysia yang memunculkan gerakan perlawanan bersenjata seperti Malayan People's Anti Japanese Army (MPAJA) serta organisasi bawah tanah anti Jepang seperti Fuxing She (Asosiasi Resiliensi) bentukan KMT dan Jizhong She (Asosiasi Sentralisasi) di Jawa yang beranggotakan lebih dari 100 orang secara cepat dibasmi oleh tentara pendudukan Jepang. Persatuan anti Fasis yang dibentuk Wang Renshu secara cepat dapat dibungkam oleh Jepang. Penerimaan secara pasif keturunan Cina terhadap kedatangan Jepang akan berimplikasi pada kedudukan mereka kemudian. Tidak lama setelah Hindia Belanda berhasil ditaklukan oleh Jepang keluar perintah untuk mengawasi secara ketat kelompok keturunan Cina. Bahkan jauh sebelum invasi Jepang ke Hindia Belanda, pemerintah pendudukan Jepang telah mengawasi kelompok etnik Cina.

Organisasi politik kelompok Cina Totok maupun Cina Peranakan seperti KMT(Kuo Min Tang) dan CHH (Chung Hua Hui, Asosiasi Orang-Orang Cina), serta merta menjadi organisasi politik terlarang pada periode ini. Banyak terjadi penangkapan terhadap orang-orang keturunan Cina yang didalamnya termasuk elite dari organisasi KMT dan CHH.⁶¹

Secara psikologis penahanan dan penangkapan yang dilakukan terhadap warga keturunan Cina menyebabkan sebagian dari mereka mengundurkan diri dari aktifitas perdagangan. Bahkan ada perlakuan diskriminatif yang membuat posisi orang Cina menjadi sulit, terutama bagi mereka yang telah menikah dengan orang Belanda, setidaknya mereka dianggap musuh oleh Jepang. Dan yang pasti proses Eropanisasi terhadap warga keturunan Cina di Hindia Belanda menjadi berhenti.

Periode pendudukan Jepang oleh sebagian Sinolog kita, seperti Didi Kwartananda sebagai proses “pencinaaan kembali” atau dengan bahasa politis yang lebih lugas telah terjadi proses sosialisasi nilai ketionghoan mereka melalui media pendidikan merujuk pada kasus yang terjadi di kota Yogyakarta.⁶² Berdasarkan kebijakan dasar Jepang di bidang pendidikan tercantum suatu dokumen berjudul ‘Kebijakan Fundamental mengenai Pendidikan di Wilayah Selatan’, yang dibuat oleh Markas Besar Balatentara Ekspedisi Selatan, tertanggal 12 Januari 1942. Dari dokumen diketahui bahwa pada awalnya Jepang sama sekali berniat menghapuskan sekolah-sekolah Tionghoa, namun bahasa Tionghoa diperkenankan untuk diajarkan sebagai kurikulum ekstra. Sejauh ini belum ada penelitian dan fakta empirik terjadinya proses resinifikasi untuk kasus Palembang.

Pendudukan Jepang di Indonesia juga bisa dimaknai sebagai bangkrutnya kelompok pedagang Cina yang bermitra

⁶¹ Twan Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*, terjemahan Apri danarto, Yogyakarta: Niagara, 2005, hal. 90-91.

⁶² Didi Kwartananda, *Lahirnya Satu Generasi Baru Tionghoa di Jawa: Pendidikan dan Resinifikasi di Yogyakarta 1930-an s/d 1950-an*, makalah pada Konferensi dan Workshop Internasional “ Dekolonisasi dan Posisi Etnis Tionghoa Indonesia 1930-an s/d 1960-an “, diselenggarakan oleh Jurusan Sejarah FIS UNP bekerjasama dengan NIOD, Padang tanggal 18-21 Juni 2006.

dengan kapitalis Belanda. Sebab pada periode ini tidak sedikit perusahaan dan firma milik warga keturunan Cina yang gulung tikar akibat kebijakan ekonomi pemerintah pendudukan Jepang yang menyukai mereka (pedagang Cina) yang berhubungan dengan sekutu. Selama periode awal masa penjajahan, sikap Angkatan Darat Jepang terhadap warga Cina tampaknya telah berpengaruh pada posisi dagang mereka. Jenderal Yamamoto yang pada awal Maret 1942 menjabat sebagai *gunseikan* (panglima militer) di Jawa, berkata pada pemuka masyarakat Cina bahwa masyarakat Cina tampak 'hormat dan patuh dari luar, tetapi tidak dari dalam'. Pernyataan yang tak kalah tegasnya dinyatakan S. Nishijima "Loyalitas warga Cina diterima secara skeptis, dan pihak penguasa menunjukkan sikap negatif terhadap eksistensi kalangan pengusaha Cina".⁶³

C. Proklamasi Kemerdekaan dan Respon Penguasa Lokal

Ilustrasi menarik bagaimana respon masyarakat Palembang ketika mendengar berita proklamasi seperti tergambar pada kutipan dibawah ini:

"Ruang tamu rumah jalan Kepandean 28 Palembang , malam hari sekitar pukul 20.00 malam berkumpul beberapa tokoh perjuangan dan pemuda. Rumah tinggal tersebut tidak lain kediaman Dr. A.K. Gani, seorang tokoh pergerakan, kiranya mereka berkumpul untuk membahas kebenaran terhadap desas-desus bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi telah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hata. Sebagian yang hadir tampak was-was dan seribu satu pertanyaan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan jika kabar baik benar-benar suatu kenyataan.".⁶⁴

Proklamasi sebagai jembatan emas menuju kepada terwujudnya masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pernyataan ini paling tidak menggambarkan betapa proklamasi menyiratkan secercah harapan akan lahirnya pemerintah yang akan

⁶³ Twan Peck Yang, *op.cit*, hal. 96.

⁶⁴ Abi Hasan Said, *Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah, Perjuangan Rakyat Semesta Menegakkan Republik Indonesia di Ujung Selatan Sumatera*, (ed) M. Uteh Riza Yahya, Jakarta: Yayasan Krama Yudha, 1992, hal. 73.

mengentaskan penduduk Indonesia dari penindasan kaum kolonial. Malam itu tanggal 18 Agustus 1945 sejumlah pemuka masyarakat Sumatera bagian Selatan hadir di kediaman A. K. Gani seperti Nungtjik A.R, A.M. Thalib, dr. M.Isa, Ir. Ibrahim, Asaari, Abdul Rozak, Komisarisi Polisi Moersod, K.H. Tjickwan , R.Z. Fanani dan beberapa tokoh pejuang lainnya yang usianya dipandang senior.

Tak ketinggalan hadir dari golongan muda seperti Maelan, orang pertama yang mendengar berita Proklamasi dari meja tugasnya sebagai operator / redaktur Domei Palembang. Dan Maelan pulalah yang membacakan teks proklamasi untuk pertama kalinya di Palembang. Anak muda lainnya yang hadir selain Maelan adalah Mas'ud Bakaruddin, Zaelani, Abi Hasan Said, Amantjik, Habibullah Azhary dan Sholeh.

Terlambatnya informasi mengenai berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di Palembang disebabkan oleh beberapa faktor yakni:

- Sukarnya komunikasi dan transportasi melalui laut, darat dan udara antara kota Jakarta- Palembang.
- Hubungan radio dipersulit, karena semua pesawat radio milik rakyat disegel oleh pemerintah Jepang setempat tanpa perkecualian.⁶⁵

Berbicara mengenai respon masyarakat Palembang terhadap berita proklamasi, tidak bisa dilepaskan dari peran penting seorang A.K. Gani, tokoh pergerakan yang memiliki kemampuan diberbagai bidang dari kedokteran, politik, ekonomi sampai ke film. Gani menyatakan secara tegas apa artinya proklamasi sebagai pernyataannya kepada para pemuda yang hadir pada pertemuan malam itu. Berikut ini petikan suasana dialog malam itu;

Beliau berkata " Tahukah kalian apa arti Proklamasi?", pertanyaan itu seperti tak pernah pupus dari ingatan seorang pemuda bernama Abi Hasan, yang

⁶⁵ Makmun Abdullah, *Serangan Balas Prabumulih 1947*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 1996, hal. 20. Pendapat senada diungkapkan oleh Bp. H.A. Zawawie Said , seorang veteran perang kemerdekaan yang saat ini menjabat sebagai ketua Legiun Veteran Republik Indonesia cabang Kota Palembang, wawancara tanggal 27 Maret 2007.

memberanikan menjawab pertanyaan Gani, "Proklamasi artinya pernyataan dalam bahasa Inggris disebut *Proclamation*." "Kamu betul", ujar Gani sambil sedikit mengganguk. "Tetapi perihal proklamasi kemerdekaan, arti dan maknanya tidaklah sesederhana itu." Ia kelihatan akan meneruskan kata-katanya itu sambil menarik nafas yang mengatur sikap. Para pemuda yang setiap waktu bisa bertemu dan berdialog dengan tokoh nasional ini tidak menyalakan kesempatan berharga itu untuk memasang perhatian seksama. "Proklamasi memiliki makna yang lebih luas, ia memiliki makna politik dan ketatanegaraan. Dia mempunyai konsekuensi-konsekuensi dan jangkauan yang jauh. Buat kita, supaya kalian mengerti, proklamasi kemerdekaan itu telah melahirkan kewajiban. Kewajiban untuk memberinya isi. Dan karena ini kita sekarang telah dihadapkan pada tantangan kecil dan besar. Pekerjaan yang kita hadapi harus segera mewujudkan satu bentuk organisasi untuk menghimpun kekuatan yang ada dalam masyarakat sehingga pada saat kekuatan itu diperlukan dapat kita benturkan pada setiap penghalang dan perusak bangunan negara yang akan kita wujudkan, sebagai mana dinyatakan dalam teks proklamasi yang tadi sama-sama kita dengar."⁶⁶

Tanggal 19 Agustus 1945 dilaksanakan pertemuan kedua di rumah Gani, tamu-tamu yang hadir jumlahnya lebih banyak. Selain tokoh masyarakat yang hadir, pertemuan ini juga dihadiri oleh para tokoh yang menjabat sebagai pemimpin organisasi buruh minyak (Salam Paiman), Parmono (Djawatan Kereta Api), R.M. Oetojo (Pos Telepon dan Telegraf), Agus Rachman dan Hanan. Sedangkan dari kelompok golongan muda, terlihat hadir seperti; M. Yunus Syamsuddin, Husin Achmad, Sualaiman Effendi, Chodewy Amin serta dari anggota *Gyugun* yakni Hasan Kasim, M. Arief dan Dani Effendi. Dalam pertemuan ini, Gani lebih menekankan bagaimana langkah-langkah yang harus diambil dalam batas-batas tertentu dan rahasia, menyangkut proklamasi kemerdekaan.

⁶⁶ Abi Hasan Said, *op.cit.*, hal. 74-75.

Tiga hari setelah pertemuan kedua di rumah Gani, *Syu Tyiokan Myako Toshio*, pimpinan pemerintahan pendudukan bala tentara Jepang di Palembang, mengundang Badan Kebaktian rakyat Daerah Palembang atau *Palembang Shyu Sangikai* untuk hadir ke Talang Semut (kawas elit tempat tinggal pejabat dai Nippon). Undangan dari Jepang tentunya melahirkan berbagai interpretasi dan kecurigaan dari pihak kita, karena khawatir mereka akan ditangkap atau mungkin dihabisi. Meskipun begitu, para tokoh masyarakat Palembang memenuhi undangan pemerintahan Jepang, mereka mempersiapkan sebuah delegasi yang terdiri dari Abdul Rozak, Nuntjik AR, R. Hanan, Asaari, Ir. Ibrahim, Bay Salim, K.H. Tjikwan, Salam Paiman dan Parmono. Sedangkan Gani, sengaja tidak diikutkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam pertemuan di kediaman *Tyiokan* yang dihadiri oleh stafnya Matsubara, Kepala Bagian Pemerintahan serta Polisi Rahasia Jepang (*Syomubutjo Tokkokatyo*). Inti dari pertemuan tersebut adalah pernyataan dari perwakilan Jepang di Palembang mengenai perintah penghentian perang oleh kaisar Hirohito serta meminta pemimpin rakyat Indonesia di Palembang dan pihak Jepang dapat menjaga keamanan dan ketertiban. Kemudian dirumuskan beberapa kesepakatan antara pihak Jepang dan pemimpin Indonesia di Palembang, yang isinya sebagai berikut:

- Soal keamanan, pihak Indonesia bersedia ikut memikul tanggung jawab sepenuhnya.
- Jepang harus menjamin keselamatan segenap pemimpin dan rakyat Indonesia, serta mereka (Jepang) tidak boleh bertindak apapun di luar pengetahuan pihak Indonesia.
- Masalah Indonesia merdeka adalah soal bangsa Indonesia sendiri dan tidak boleh dihalangi.⁶⁷

D. Reorganisasi dan Restrukturasi Bidang Politik dan Keamanan

Sebagai respon terhadap berita kekalahan Jepang dari sekutu, para pemimpin dan tokoh masyarakat di Palembang membentuk pemerintahan sipil di Palembang pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan susunan sebagai berikut:

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 76-77.

- Dr. A.K. Gani : Kepala Pemerintahan
- Abdul Rozak : Wakil Kepala Pemerintahan
- Asaari : Kepolisian
- R. M. Moersodo : Kepolisian
- Ir. Ibrahi : Kemakmuran
- Nungtjik AR : Penerangan
- Dr. M. Isa : Urusan Minyak dan Pertambangan
- R.Z. Fanani : Urusan Pemerintahan
- K. H. Tjikwan : Urusan Pemerintahan
- R.M. Oetojo : Perhubungan/PTT
- R. Hanan : Kepala Pemerintahan Kota Palembang⁶⁸

Terbentuknya pemerintahan sipil di kota Palembang, diikuti pula munculnya organisasi yang anggotanya sebagian besar merupakan pemuda terpelajar yang memiliki motivasi untuk membangkitkan kesadaran baru tentang pentingnya persatuan pada wal kemerdekaan. Beberapa organisasi seperti Hizbul Watthan (Muhammadiyah), beberapa organisasi kepemudaan *onderbouw* Partai Politik seperti SIAP (PSII), Suryawirawan (Parindra) serta kelompok lainnya di bawah Indonesia Moeda dan Gerindo. Setidaknya ada dua organisasi kepemudaan yang tumbuh pada awal revolusi di Palembang, yakni BPRI (barisan Pemoeda Republik Indonesia) dan BPKR (Badan Penjaga Keamanan Rakyat).

Organisasi pertama menghimpun para pemuda aktivis sebelum yang tergabung dalam badan propaganda Jepang, misalnya *hookokai*. Sedangkan BPKR menghimpun para pemuda yang pernah mendapat pendidikan militer seperti *Heiho* dan *Gyugun*. Aksi - aksi spontan dengan tujuan meningkatkan semangat patriotisme dilakukan oleh kelompok pemuda di Palembang pada awal kemerdekaan seperti meneriakkan "slogan kemerdekaan" sambil berkonvoi disekeliling kota Palembang, pemancangan bendera merah putih diatas tiang gedung *Watertoren* (gedung Menara Air).

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 78, Makmun Abdullah, *op.cit.*, hal 21. lihat juga Mestika Zed, *op.cit.*, hal. 280.

Pada tanggal 2 Oktober 1945 sesuai dengan keputusan rapat yang diselenggarakan di sebuah rumah di jalan Semeru (rumah Bayumi Wahab), para pemuda seperti Matjid Rosyad bertemu dua utusan pemuda Palembang yang baru tiba dari Jakarta, yakni Zaelani dan Uteh Reza. Mereka berhasil membentuk BPRI beserta susunan pengurusnya, yakni sebagai berikut:

- Ketua Umum : Mattjik Rosyad
- Wakil Ketua Umum : Mailan
- Pembantu : M. Zailani, A. Rachim Kasim, K.A. Ansyori, Nn. S.N. Asaari, Nn.Syachroezam Sy, Nn. Wahidah Lison, Nn. Syarrizal Sy.
- Sekretariat : M. Yunus Syamsudin, Abi Hasan said, Habibullah Azhary, M. Amantjik.
- Keuangan : Zaini Mansyur, Idris Asyik, Ali Asaary, Soelaiman Effendi, Abdullah Yasin.
- Perhubungan : Moh Uteh Reza Jahya, Ferdy Salim, Syaiful Lacoay, Nawawi Asim, Soelaiman E. hasyim, M.B. Alwi
- Penerangan : M. Zailani, A. rahim Kasim, Husin Achmad, K.A. Ansyori, A. Achlawy Hamdy.
- Bagian Umum : Hosein Achmad, H. Elwany hamdy, Chodewy Amin.
- Bagian organisasi : M. Zailani.
- Bagian Usaha : Soelaiman Effendi, Abdullah Jasin, M.A Yahya.
- Markas Kota : R. Soekarsono, Soebadi, Ali Yasin.
- Sei Buah-Sektor I : Abdullah Chair, H. Masyhur, Kemas Soelaiman.
- 15 Ilir- Sektor II : Aboehasan, Boedjang Yacob, Noentjik Oetih, Azis.
- 16 Ilir- Sektor III : Kemas Syarifoedin, Ismail K. Achmad, Joesuf saleh.

- 26 Ilir- Sektor IV : A.M. Jangtjik, Masagus A. hasim, Tojib Hajin, Sakdullah, Tony Alwy, Darmansyah.⁶⁹

BPRI dibentuk dan dibangun tanpa penyediaan dana, semuanya dilaksanakan secara spontan. Meskipun dalam kepengurusan telah dicantumkan jabatan bendahara dengan beberapa pembantunya yang bertugas mengumpulkan dana. Modal pertama justru berasal dari dana pribadi para pemuda yang terlibat dalam kepengurusan BPRI. Selain itu menggalang donasi, para pemuda menerima bantuan dari pengusaha seperti dari keluarga Familidin, Anang Firma. Kemudian setelah melalui berbagai cara dan pendekatan kepada Residen Palembang mereka memperoleh bantuan dana dari pusat.

Inisiatif pembentukan BPKR di Palembang diprakarsai oleh Hasan Kasim, seorang perwira *gyugun* yang pernah bertugas sebagai penjaga lapangan udara di Lahat. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 5 September 1945, yang anggotanya berasal dari bekas *gyugun*. Mereka yang bergabung dalam BPKR antara lain Mohammad Arif (Pagar Alam), P. Hutagalung (BPM), Dani Effendi (Talang Betutu) dan R. Abdullah.⁷⁰

Selain organisasi diatas, pada awal revolusi di Palembang, ternyata masyarakat keturunan Cina di kota ini juga mengorganisasi barisan perjuangan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, yang diberi nama Persatuan Kaum Tani Tionghoa (PKTT). Atas prakarsa seorang pemuda bernama Theng A Suy, yang berasal dari keluarga petani. Organisasi ini berada langsung dibawah otoritas Gani. Kelompok ini di awal kemerdekaan terkenal dengan julukan "*The Great Smugler*". Organisasi berperan sebagai pemasok sayur mayur, beras, daging serta menyuplai perlengkapan telekomunikasi, obat-obatan serta keperluan yang dibutuhkan oleh Gani dkk di Palembang.

Setelah hilangnya Theng A Soey secara misterius, maka PKTT mengalami kemunduran serta perpecahan didalam internal mereka. Selain nama diatas, juga dikenal Theng Lian Joo atau dikenal dengan Tong Djoe, yang masih merupakan kerabat dari Theng A Soey. Pemuda berperan sebagai operator pelaksana

⁶⁹ Abi Hasan Said, *op.cit.*, hal. 90-91.

⁷⁰ Mestika Zed, *op.cit.*, hal. 297.

penyelundupan dengan kapal laut antara Singapura-Palembang.⁷¹

E. Kedatangan NICA di Palembang dan Implikasinya

Sesuai dengan kesepakatan bahwa wilayah Indonesia yang semula merupakan wilayah kekuasaan Hindia Belanda sebelum dikuasai oleh Jepang. Maka setelah berakhirnya perang dunia II, dimana sekutu sebagai pihak yang menang yang di dalamnya termasuk Belanda harus dikembalikan kepada penguasa sebelumnya. Kedatangan sekutu di daerah Palembang relatif lebih lambat dibandingkan daerah-daerah lain di Sumatera. Pendaratan tentara sekutu di Palembang baru terlaksana pada tanggal 22 Oktober 1945.

Wilayah Sumatera termasuk Palembang berada dibawah tanggung jawab Komando Sekutu Asia Tenggara (*Southeast Asia Command; SEAC*) dibawah pimpinan L. Mountbatten yang berpangkalan di Colombo (Sri Lanka). Kedatangan sekutu di Palembang dengan badan pemerintahan seperti AMA (*Allied Military Administration*), AMACAB (*Allied Military Administration Civil Affairs Branch*) dan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*).

Tugas utama sekutu semula untuk melucuti bala tentara Jepang serta menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah dimana ditugaskan. Posisi sekutu serba dilematis mereka menghadapi dua pihak yang masing-masing berbeda kepentingan. Kaum republik dengan semangat euphoria kemerdekaan dan Belanda yang berambisi ingin mengembalikan kembali hegemoni mereka di Indonesia. Ambisi Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia didasarkan pada prinsip politik sebagaimana isi pidato Ratu Wilhelmina 1942, dimana Indonesia akan dijadikan sebagai "*Commenwealth*" dalam bentuk federasi. Untuk memperoleh itu mereka tidak segan menggunakan segala cara baik secara diplomasi maupun kekuatan militer.⁷² Pada prinsipnya bangsa Indonesia pada periode ini siap menghadapi intervensi asing, sedangkan pihak Sekutu dan Belanda masa penyerahan Jepang sebagai kurun waktu pasca perang. Periode secara luas dikenal sebagai periode "revolusi" yakni perombakan

⁷¹ Abi Hasan Said, *op.cit.*, hal. 97.98.

⁷² Makmun Abdullah, *op.cit.*, hal. 25.

terhadap segala tata nilai dan mitos yang ditanam oleh orde kolonial.⁷³

Hubungan antara pemimpin lokal seperti Gani dengan sekutu yang berjalan baik, menjadikan kondisi keamanan kota Palembang relatif kondusif. Di lain pihak Belanda mulai melancarkan upaya infiltrasi untuk memprovokasi kepada pihak-pihak tertentu untuk mendukung rencana mereka, salah satu melalui kantor distribusi bahan makanan (*Algemeen Distrutie Dienst*). Sebenarnya secara efektif sekutu menjalankan tugasnya di Palembang, mulai pada awal tahun 1946.

Akan tetapi beberapa insiden kecil seperti tersiarnya berita hilangnya tukang masak (koki) pada angkatan laut Inggris, ketebulan seorang Cina pada awal Februari 1946, menyebabkan ketegangan antara pihak Sekutu dengan pihak Republik. Insiden-insiden kecil seperti inilah akhirnya bermuara pada munculnya konfrontasi lebih besar antara pihak Republik dengan Sekutu yang diboncengi oleh tentara NICA dengan terjadinya peristiwa heroik rakyat Palembang yakni "Perang Kota 120 Jam Rakyat Palembang " atau Pertempuran Lima Hari Lima Malam.⁷⁴

⁷³ Mestika Zed, *op.cit.*, hal. 332.

⁷⁴ Asnawai Mangkualam, *Perang Kota 120 Jam Rakyat Palembang*, ed (Zawawie Said), Jakarta: Aksara Baru, 1986.

BAB III

RELASI ORANG CINA DAN PENGUASA DI PALEMBANG PADA MASA REVOLUSI

A. Pasang Surut Hubungan Orang Cina dengan Palembang

Sejauh menyangkut perkiraan hubungan antara Palembang dengan Cina belum ditemukan keterangan yang pasti, apakah telah berlangsung sebelum atau sesudah adanya kerajaan Sriwijaya masih diperdebatkan.⁷⁵ Beberapa sumber Cina, diantaranya kronik *Chu-fan-chi* karya Chau Ju-kua tahun 1225 menyebut Palembang dengan sebutan *Pa-lin-fong* sebagai salah satu bawahan dari San-fo-tsi,⁷⁶ sedangkan yang dimaksud San-fo-tsi menurut kronik *Ling-wai-tai-ta* karya Chau Ku-fei tahun 1178 adalah kerajaan *Chan-p i*(Jambi).⁷⁷ Sedangkan Ma Huan dalam laporan ekspedisinya dari kawasan laut selatan mendokumentasikan pengalaman dalam tulisannya yang berjudul *Yin-yai-Sheng-lan* (Pemandangan- pemandangan indah di sekitar Laut Selatan) tahun 1416, menyatakan bahwa Ku-kang merupakan negeri yang dahulunya disebut San-fo-tsi (San-bo-tai).⁷⁸

Selain terdapat dalam kronik Cina, nama Palembang pada zaman klasik juga tertulis dalam *Nagara Kartagama* karya Prapanca pada tahun 1365. Dalam pupuh XIII disebutkan negara-negara bawahan Majapahit di daerah Melayu antara lain: Jambi, Palembang, Dharmasraya, Toba dan sebagainya. Setelah

⁷⁵ Perdebatan mengenai *nomenklatur* Palembang muncul dari adanya penafsiran tempat dikaitkan dengan beberapa pendapat dari para ahli. Buchori (1989) menyebut *Palimbang* atau *Malimbang* sebagai nama *wanua* (kampung) mungkin telah ada pada masa kekuasaan Dapunta Hyang.

⁷⁶Friedrich Hirth & W.W. Rockhill ed, *Chau-Ju-Kua: His Work on the Chinese and Arab Trade in the 12 th & 13 th centuries, entitled Chu-fan-chi*, Oriental Press, Amsterdam, 1966, hal 60-67.

⁷⁷ O.W. Wolters, *The Fallof Sriwijaya in Malay History*, Singapura: Oxford University Press, 1970.

⁷⁸ Ma-Huan, *Ying-Yai Sheng-lan*, "The Overall Survey of the Ocean's Shores" (1433) terjemahan dari bahasa Cina oleh Feng Ch'eng-chun, pengantar, catatan dan appendiks oleh J.V.G. Mills, Cambridge:University Press, 1970, hal 98-102, dalam Djohan Hanafiah, *Melayu-Jawa, Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 87-90.

masuknya Islam dan munculnya Kesultanan Palembang nama Palembang disebutkan secara familiar baik oleh *Babad Tanah Jawi* (1680) dan *Sejarah Melayu* (1612). Dalam *Sejarah Melayu* ada teks yang menyebutkan mengenai Palembang, yakni :

..ada sebuah negeri di tanah Andalas, Perlembang namanya, Demang Lebar Daun nama rajanya, asalnya daripada anak-cucu Raja Sultan; Muara Tatang nama sungainya. Adapun negeri Perlembang itu, Palembang yang ada sekarang inilah. Maka Muara Tatang itu ada sebuah sungai, Melayu namanya; didalam sungai itu ada sebuah bukit Seguntang Mahameru namanya.⁷⁹

Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan pada abad ke-12 berimbas dengan semakin surutnya posisi kerajaan ini sebagai kekuatan ekonomi dan politik pada abad-abad berikutnya. Munculnya Majapahit sebagai kekuatan baru dalam konstelasi politik nusantara pada masa menjelang keruntuhan Sriwijaya menjadi salah satu faktor yang mempercepat kemunduran Sriwijaya di panggung sejarah peradaban nusantara.

Bahkan Majapahit menjadikan Palembang sebagai tempat yang strategis bagi ekspansi dan ambisi Majapahit di belahan barat nusantara. Penaklukan Majapahit terhadap wilayah *Suwarnadwipa* diperkirakan sekitar tahun 1350. Untuk beberapa periode lamanya Palembang tenggelam di bawah bayang-bayang kebesaran Majapahit. Kebesaran Majapahit sebagaimana model politik kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional di Nusantara lainnya berangsur-angsur memudar seiring dengan munculnya konflik internal serta berkembangnya kekuatan-kekuatan baru yang lebih progresif.

Persaingan dan rivalitas diantara penguasa lama dan baru seringkali muncul karena adanya alternatif-alternatif sistem baru maupun faham-faham baru yang berkembang dalam masyarakatnya. Kemudian perbedaan adopsi dan pemahaman nilai baru antara daerah pedalaman yang cenderung terisolir sebagaimana model pemerintahan yang dianut Majapahit cenderung bersifat sentralistik dan otokrasi bila dibandingkan

⁷⁹ Abdullah bin Abdul kadir Munsyi, *Sedjarah Melayu*, editor T.D. Situmorang dan Prof. Dr. A. Teeuw, Jakarta: Jambatan, 1958, hal 22.

dengan wilayah-wilayah pantai yang cenderung memiliki pluralitas dan demokratis masyarakatnya.

Kemudian komunikasi serta rentang jarak yang jauh antara pusat kekuasaan dan wilayah kekuasaannya menjadikan Kerajaan Majapahit tidak sepenuhnya mampu mengontrol teritorialnya, termasuk dalam hal ini Palembang. Munculnya Islam sebagai kekuatan baru di nusantara semakin memperlemah daya tawar Majapahit terhadap daerah-daerah yang masyarakatnya serta penguasanya telah masuk Islam.

Transisi dari satu kekuatan politik kepada kekuatan politik lain senantiasa diwarnai dengan instabilitas politik dan sosial dalam masyarakat. Dalam kasus Palembang Parameswara yang sebelumnya menjadi wakil penguasa Majapahit di Palembang, berbalik haluan dengan menentang hegemoni negara induknya pada tahun 1397. Usaha dari Parameswara tidak berhasil sepenuhnya, bahkan ia harus menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Majapahit dan akhirnya mengungsi ke Malaka.

Dalam kondisi tiadanya penguasa yang secara definitif dan *powerfull* di Palembang pada masa transisi ini dimanfaatkan oleh beberapa kelompok masyarakat yang secara kultural memiliki pemimpin kelompok termasuk para petualang dan imigran Cina yang telah berada di Palembang pada masa kekuasaan sebelumnya (Sriwijaya). Semula orang-orang Majapahit mencoba menunjuk wakil mereka sebagai kepala di Palembang, akan tetapi langkah tersebut mendapat penolakan dari orang-orang Cina yang telah menetap lama di Palembang.

Bahkan sebagai tanggapan tindakan Majapahit tersebut, orang-orang Cina di Palembang mengangkat Liau Tiau-ming, salah seorang perompak dengan reputasi hebat sebagai pemimpinnya. Dokumen tertulis mengenai periode kepemimpinan dan aspek kekuasaan orang-orang Cina di Palembang pada periode ini tidak ada keterangan yang jelas, akan tetapi fakta sejarah tentang adanya para orang Cina yang menjadi "*raja*" di Palembang merupakan fakta sejarah yang terbantahkan.

Biasanya informasi mengenai perkembangan kerajaan dan penguasa di wilayah *-Nan Yang-Laut Selatan*⁸⁰ dan relasinya dengan penguasa Cina daratan didokumentasikan dalam bentuk kronik atau catatan perjalanan yang dilakukan oleh para utusan atau wakil baik dari penguasa wilayah yang menyatakan tunduk kepada penguasa Cina maupun sebaliknya laporan dari muhibah dari pejabat atau utusan resmi kekaisaran Cina yang berkunjung ke wilayah taklukan tersebut.

Informasi mengenai Palembang pada periode ini justru berasal dari laporan anak Liau Tiau-ming yang dibawa oleh komandan pertahanan kekaisaran bernama Sun Hsuan. Kaisar Yung Lo kemudian mengirim rombongan khusus ke Palembang di bawah pimpinan T'an Sheng-shou pada tanggal 20 Februari 1405. Informasi putera Liang Tau-ming mungkin merupakan sumber Cina yang utama, dimana sumber ini juga menguraikan tentang pencalonan orang Jawa, pemilihan umum untuk mengangkat Liau Tiau-ming serta kehancuran Palembang serta peristiwa-peristiwa yang membawanya ke Cina

Pada masa Kesultanan Palembang posisi orang Cina sebagai pedagang perantara berada dibawah kolega mereka (orang Arab). Orang-orang Cina pada masa ini memperdagangkan barang-barang seperti barang pecah-belah, sutera kasar, benang emas, panci-panci besi, obat-obatan, teh, manisan dan barang-barang Cina lainnya. Sementara rekannya Orang Arab berdagang kain linen. Orang-orang pribumi biasanya memperdagangkan hasil-hasil pertanian dan hutan seperti rotan, damar, lilin dan sebagainya. Dalam berdagang bisanya mereka menggunakan perahu yang disebut *wangkang*, yang mirip dengan kapal atau jung Cina hanya ukurannya lebih kecil.⁸¹

Ada semacam perlakuan berbeda yang dilakukan pihak Kesultanan Palembang terhadap orang-orang Cina pada masa ini. Orang-orang Cina tidak diperbolehkan memiliki lahan pertanian, mereka diperkenankan tinggal di kota Palembang. Akan tetapi mereka harus tinggal diatas perahu yang disebut "rumah rakit" di Sungai Musi. Kebijakan ini diambil oleh Sultan

⁸⁰ *Nan Yang* - Laut Selatan sekarang merupakan wilayah Asia Tenggara.

⁸¹ *Ibid.*, Sevenhoven, J.L. Van, *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, terjemahaan oleh Sugarda Purbakawatja, Jakarta: Bhartara, hal. 47

dengan maksud untuk melindungi kepentingan kerajaan serta memudahkan pihak kesultanan untuk mengendalikan orang-orang Cina, yakni dengan cara membakar rumah rakit mereka kalau dipandang keberadaan orang Cina membahayakan.⁸²

Sedangkan terhadap orang Arab, pihak kerajaan Palembang memperbolehkan pedagang Arab membangun gudang mereka di darat. Juga di lingkungan keraton, orang Arab yang umumnya datang dari Hadramaut mempunyai kedudukan khusus. Orang Belanda yang pernah mengunjungi keraton Palembang menyaksikan, bahwa jika pembesar kerajaan menghadap raja, mereka harus menyembah sampai menyentuh lantai, sedangkan orang Arab boleh di kursi di sisi Sultan. Juga dalam segi hukum orang Arab juga hampir kebal.⁸³

Kedekatan orang Arab dengan pihak Kesultanan Palembang, selain karena faktor kesaman agama (Islam), juga karena mereka dianggap mumpuni dalam masalah agama Islam. Dari temuan bukti-bukti arkeologis yang terdapat pada situs-situs tersebar dikota Palembang, seperti di situs Kawah Tekurap dan situs Cinde Walang memperkuat bukti diatas. Di situs Kawah Tekurap terdapat makam seorang Imam Arab yakni Sayid Idrus Abdullah Allaidrus yang makamnya berdampingan dengan makam Sultan Mahmud Badaruddin Jayadikrama serta makam Sayid Mustafa Allaidrus yang makam bersebelahan dengan makam Susuhunan Abdurahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam.⁸⁴

Perubahan secara drastik dalam bidang sosial ekonomi terjadi di Indonesia termasuk di Palembang, ketika pemerintah kolonial Belanda mulai berkuasa. Dengan kebijakan politik *divide et empera*, penguasa kolonial menjalankan politik pemisahan rasial, yakni struktur sosial masyarakat Hindia Belanda dibagi ke dalam golongan yakni: golongan lapisan atas (orang Eropa), Timur Asing (Arab, India dan Cina) dan yang paling pribumi. Kondisi ini semakin diperkokoh dengan adanya

⁸²Ibi., hal. 21.

⁸³ Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo, Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, Jakarta: INIS, 1997, hal. 15.

⁸⁴ Jumhari dkk, *Arab Palembang dar Masa Kesultanan Sampai Kolonial Belanda, Suatu Kajian Sejarah Sosial*, Padang: BKSNT, 2006, hal. 89.

pengelompokan hunian (pemukiman) berdasarkan kelompok etnik tertentu. Maka di kota-kota besar di Indonesia pada masa kolonial, seperti Batavia, Semarang termasuk pula Palembang dijumpai kampung-kampung berdasarkan kategori tersebut, seperti kampung Cina, Kampung Arab, Kampung Jawa, Kampung Bugis dan Kampung etnik lainnya, yang mencerminkan pemisahan secara fisik.⁸⁵

Untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan "*rust en orde*" Belanda menunjuk individu tertentu dari masing-masing kelompok etnik untuk memiliki kepala atau pimpinan sendiri. Jabatan pimpinan diberikan oleh pemerintah kolonial mirip dengan tingkatan jabatan militer, misalnya: Mayor, Kapiten dan Letnan.⁸⁶ Di Palembang Kapiten Arab yang pertama dijabat oleh Pangeran Syarif Abdurahman Al Habsyi. Sedangkan Kapiten Cina yang pertama di Palembang adalah Tjoa Ham Him pada tahun 1855.⁸⁷

Seorang kapiten Cina memiliki tugas antara lain sebagai perantara antara masyarakatnya dengan pemerintah kolonial serta menjaga keamanan dan ketertiban. Kapiten Cina mempunyai hak dan kewenangan untuk mengadili semua perkara yang ada dalam masyarakatnya. Selain itu ia memiliki kewajiban pula dalam masalah administrasi seperti mengurus surat kelahiran, surat kematian, surat nikah, surat cerai, surat jalan, surat wasiat dan melakukan penghitungan jumlah anggota masyarakatnya (*sensus*).⁸⁸ Dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda kedudukan seorang Kapiten Cina selain perantara juga merangkap sebagai penasihat pemerintah, terutama berkaitan

⁸⁵ Mona Lohanda, *The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 2001.,hal 1-35.

⁸⁶ Pangkat Militer Tituler adalah bentuk-bentuk kepangkatan yang ada atau berlaku pada kemiliteran. Kepangkatan militer diberikan untuk membedakan dengan masa sebelumnya, pada masa VOC sebutan Kapiten Cina tidak ada hubungan dengan pangkat dalam militer untuk jelasnya baca buku T.S.Wardoyo, *Tan jin Sing dari Kapiten Cina sampai Bupati Yogyakarta*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, hal 152

⁸⁷ Eka Asih Putriana Taim, *Pemukiman Tepi Sungai di Kota Palembang Dari Masa Ke masa*, dalam *Jurnal Arkeologi Siddhayarta* Volume 7 NO.2, Palembang: Balai Arkeologi Palembang, 2002, hal 31.

⁸⁸ Wardoyo, *op.cit*,

dengan masalah penarikan pajak serta urusan yang menyangkut informasi hukum dan peraturan kolonial.

Seringkali kita menganggap orang Cina yang tinggal di Indonesia semuanya sama, termasuk mereka yang bermukim di Palembang. Padahal mereka bukanlah kelompok masyarakat yang homogen. Sebab mereka berasal dari berbagai macam suku bangsa yang datang dari daerah Selatan Cina, seperti propinsi Kwantung, Fukien dan Kanton. Orang Cina yang berasal dari propinsi Kwantung adalah suku bangsa Teo-Chiu sedangkan orang Hakka tinggal di daerah pedalaman Swantow. Sedangkan orang Hokkien berasal dari propinsi Fukien dan orang Kwong-Fu berasal dari daerah Kanton. Mereka memiliki mata pencaharian yang beragam. Orang Hookkien yang pada umumnya berdagang, orang Teo-Chiu berprofesi sebagai petani sedangkan orang Hakka bergerak di lapangan industri kecil dan pertambangan. Sehingga tidak benar bahwa semua orang Cina di Indonesia pada dasarnya berprofesi sebagai pedagang.⁸⁹

Kategorisasi yang membedakan antara *Cina Peranakan* dan *Cina Totok* mulai terbentuk sejak pemerintah kolonial berkuasa di Indonesia. Hal dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk membedakan antara orang Cina Totok (*singkeh*⁹⁰) yang berasal dari daratan Cina dan orang Cina Peranakan yang lahir dari perkawinan campuran antara laki-laki Cina dan perempuan pribumi. Cina Peranakan kebanyakan berasal dari imigran Cina gelombang pertama yang pada umumnya laki-laki. Sedangkan *Singkeh* merupakan imigran gelombang kedua, yakni didatangkan oleh pemerintah kolonial untuk dipekerjakan sebagai buruh di pertambangan dan perkebunan di Hindia Belanda.

Tionghoa Totok dapat dikenali dari bahasa ibu (bahasa pengantar) yang dipergunakan sehari-hari, yang umumnya masih menggunakan dialek dari daerah asalnya. Sedangkan orang Cina Peranakan menggunakan bahasa pengantar lokal dimana mereka tinggal. Perbedaan di antara Totok dan Peranakan pada

⁸⁹ Puspa Vasanty, *Kebudayaan Orang Tionghoa di Indonesia*, dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1900, hal 353-354

⁹⁰ *Ibid.*,

akhirnya berkembang pula dalam penerapan adat dan tradisi mereka seperti dalam urusan peribadatan dan orientasi hidup.

Dalam hal penampilan fisik dan gaya hidup sehari-hari, terlihat perbedaan yang nyata. Orang Totok lebih cenderung konservatif, baik dalam cara berpakaian maupun penampilan fisiknya. Laki-laki orang Cina Totok pada masa ini biasanya rambutnya dikuncir panjang dan diikat pita. Pakaian yang mereka kenakan adalah baju panjang berlengan lebar dan celana longgar. Sedangkan kaum perempuan Totok memakai pakaian *pekki* yang terdiri dari baju kurung panjang, celana longgar dan berselop bordur. Kaki perempuan orang Cina Totok biasanya kecil, sebab ada tradisi kaki perempuan sejak usia kanak-kanak dimasukkan ke bambu. Sedangkan Cina Peranakan lebih modern dan terbuka, mereka senantiasa mengikuti trend mode yang berkembang.⁹¹

Perbedaan antara Totok dan Peranakan ini pada periode selanjutnya mempengaruhi pula dalam orientasi pendidikan dan organisasi sosial mereka, apalagi sejak diperkenankan memasuki dunia pendidikan modern. Pendidikan barat yang mulai diperkenalkan oleh kolonial Belanda sejak era politik etis, mendapat sambutan yang berbeda di kalangan masyarakat Cina. Orang Cina Peranakan lebih dapat menyerap masuk ke dalam sistem pendidikan barat ketimbang orang *Singkeh*.

Perbedaan orientasi pada akhirnya menyebabkan tidak adanya satu sikap politik orang Cina yang tinggal di Hindia Belanda. Mereka senantiasa berada diantara kepentingan kolonial Belanda dan kesetiaan terhadap negara leluhur mereka. Persoalan ini muncul tak lain karena perbedaan penerapan azas hukum kewarganegaraan antara Belanda yang menerapkan azas *ius soli*, sesuai dengan undang-undang kewarganegaraan Belanda (*Nederlandsch Onderdaanschap*). Sedangkan di negara Cina, mereka yang memiliki darah keturunan Cina dari orang tuanya sesuai dengan undang-undang kewarganegaraan Cina tahun 1910 adalah warga negara Cina (*ius sanguinis*).⁹²

⁹¹ Siauw Giok Tjhan, *Lima Jaman Perwujudan Integrasi Wajar*, Jakarta-Amsterdam: Teratai, 1984, hal 53.

⁹² Lindayanti, " Komunitas Orang Cina di Palembang pada Awal Kemerdekaan Indonesia 1945-1950 dalam *Arung Samudra, Persembahan Memperingati*

Pada awal abad ke-20 di Palembang didirikan sekolah Cina Belanda atau *Hollandsch Chineshe School* (HCS) yang gedungnya berlokasi di kampung 7 Ulu.Lama pendidikannya 7 tahun, sedangkan kurikulumnya sama seperti Sekolah Rendah Eropa (*Europesche Lagere School*), dengan bahasa pengantar bahasa Belanda.⁹³ Sejauh ini penulis belum menemukan data mengenai kecenderungan antara orientasi pilihan lembaga pendidikan dengan sikap politik orang Cina di Palembang pada sekarang. Akan tetapi secara umum, sebagaimana kelompok Cina lainnya di Indonesia, kelompok Cina Peranakan lebih menyukai lembaga pendidikan barat serta berafiliasi dengan organisasi politik *Chung Hwa Hui* (CHH). Sedangkan kelompok *singkeh* pada umumnya masuk THKK (*Tiong Hoa Hwee Koan*).⁹⁴

Perpecahan dalam internal yang terjadi dalam kelompok ini ternyata berlanjut. Pada masa pendudukan Jepang. Pada masa ini semua kegiatan politik dilarang, mereka yang melawan ditangkap dan dipenjarakan, serta ada juga yang bekerjasama. Dua orang Cina yang pro nasionalis Indonesia seperti Oeng Tjong Hauw (CHH) dan Liem Koe Hian (PTI), dikemudian hari diangkat sebagai anggota BPUPKI.

Ambiguitas sikap Cina seringkali membuat sikap menjadi dilematis, ketika pada masa revolusi terjadi perimbangan kekuasaan antara kaum Republik dengan Belanda. Masa transisi "revolusi" membuat orang Cina di Indonesia termasuk di Palembang tidak luput tarik-menarik kepentingan dari kedua belah pihak tersebut. Orang Cina merupakan gologan perantara antara penguasa dengan pribumi dan merupakan pihak yang pertama kali menjadi korban pada awal kemerdekaan, yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Sembilan Windu A.B. Lopian, Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lembaga Penelitian UI, 2001, hal 422.

⁹³ Kemas Ari, *Masyarakat Tionghoa Palembang, Tinjauan Sejarah Sosial (1823-1945)*, diterbitkan atas kerjasama Forum Pengkajian Sejarah Sosial dan Budaya dengan Paguyuban Masyarakat Tionghoa Indonesia Cabang Palembang, 2003, 50.

⁹⁴ Untuk memahami perbedaan orientasi politik orang Cina pada awal abad ke-20 lihat karya Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: Grafitipers, 1986, hal. 43-53.

Pada dasarnya pemukiman Cina Indonesia terbentuk oleh adanya kegiatan ekonomi (perdagangan), selain itu karena adanya kebijakan pemerintah kolonial yang mendatangkan imigran Cina sebagai buruh perkebunan dan pertambangan pada paroh abad 19. Contoh daerah yang mengalami penambahan jumlah peningkatan orang Cina akibat eksploitasi sumber-sumber alam seperti Pulau Bangka dan Belitung (tambang timah) dan Kalimantan Barat (tambang emas). Orang-orang Cina yang didatangkan dari tiga daerah tersebut umumnya adalah penutur dialek Hakka, Teochiu, Hokkian, Kanton, dengan mayoritas adalah Hakka. Mereka ini semuanya bekerja sebagai buruh.⁹⁵

Pemukiman orang Cina di Palembang, pada awalnya sangat dipengaruhi oleh keberadaan sungai sebagai sarana transportasi. Keadaan geografis Palembang yang terdiri dari daerah aliran sungai dan rawa-rawa, maka pola pemukimannya pun cenderung linear. Kecenderungan terhadap pentingnya peranan sungai memberi dampak bagi munculnya pemukiman linear berikutnya melapis pemukiman sebelumnya.⁹⁶

Pemukiman Cina pada masa Kesultanan biasanya dibangun di atas rumah terapung "*rumah rakit*". Rumah rakit ini selain berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus berfungsi sebagai toko atau warung tempat jualan, bahkan berfungsi juga sebagai rumah penginapan. Pada masa kekuasaan kolonial, pemukiman Cina di Palembang tidak mengalami perubahan berarti, sebab pemerintah kolonial Belanda lebih menitik beratkan pada pembangunan yang mengarah ke darat untuk pemukiman, perkantoran, maupun pusat-pusat perdagangan yang berlokasi di daerah Seberang Ilir. Pembangunan di Seberang Ilir menyebabkan pembangunan berkembang ke daerah Ulu meskipun tetap berorientasi ke sungai. Hal ini terjadi terutama di kawasan pusat-pusat pemerintahan dan pusat-pusat perekonomian seperti Benteng Kuto Besak, Pasar Sekanan, Pasar 16 Ilir dan sebagainya.

⁹⁵Charles Coppel, "*Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia*", dalam JAC Mackie (ed), *The Chinese in Indonesia: Five Essays*, Hawaii: University Press, 1976, hal 1-5

⁹⁶ Retno Purwanti, *Sejarah Perkembangan Pemukiman Masyarakat Cina di Palembang*, dalam *Jurnal Arkeologi Siddhayarta* Volume 7 NO.2, Palembang: Balai Arkeologi Palembang, 2002, hal 46.

Rumah-rumah rakit yang berada langsung di atas air tetap mempunyai pola linear hanya saja dari segi kuantitas jumlahnya berkurang. Hal ini terjadi karena perkembangan zaman, yang lambat laun membentuk rumah panggung.⁹⁷ Kondisi ini juga berlaku untuk orang-orang Cina yang berda di kampung 7 Ulu. Bentuk arsitektur pemukiman Cina di Palembang terkesan unik, yang membedakannya dengan model rumah milik pribumi atau etnis lainnya seperti Arab. Arsitektur rumah-rumah Cina di Palembang pada umumnya merupakan arsitektur campuran dari unsur arsitektur lokal (Palembang), Cina dan Kolonial, seperti terlihat pada gambar rumah kapiten Cina di bawah ini:

Gambar 2. Rumah Kapiten Cina di Kampung 7 Ulu Palembang



Sumber: Dokumen Tim, 2007

⁹⁷ *Ibid.*, hal 47

B. Hubungan Orang Cina dengan Republik Indonesia

Keterisoliran orang Cina dalam politik Indonesia dan tidak terjadinya kebersamaan dalam menghadapi Belanda dapat dilihat dari orientasi politik yang terlihat fragmentaris sejak awal abad ke-20 sampai proklamasi kemerdekaan. Seperti pada bagian sebelumnya, bahwa ada faktor internal seperti terbentuknya pembagian masyarakat Hindia Belanda yang menempatkan orang Cina sebagai golongan menengah diatas pribumi dan di bawah bangsa Eropa. Sedangkan faktor eksternal terjadi intervensi politik negara Cina, terhadap status kewarganegaraan orang Cina di seberang lautan.⁹⁸

Konsekuensi dari sikap yang cenderung mendua yang ditempuh oleh orang Cina di Hindia Belanda, pada akhirnya memunculkan reaksi dari organisasi politik pribumi seperti PNI (Partai Nasional Indonesia), dimana dalam anggaran dasar pasal 4, menyebutkan bahwa mereka yang menjadi anggota partai ini adalah orang-orang Indonesia, yang umurnya tidak kurang dari 18 tahun. Orang Asia lainnya boleh diterima sebagai anggota luar biasa. Ini secara eksplisit dalam proses pembentukan *nation-state*, kaum nasionalis lebih didasarkan pada warga pribumi asli.⁹⁹

Pada awal kemerdekaan Indonesia jumlah orang Cina yang tinggal di Palembang berjumlah 40.000 orang, yang terdiri dari 25.000 orang Cina Totok dan 15.000 orang Cina peranakan. Dari jumlah ini ada sekitar 5.000 orang Cina yang berpindah dari daerah pedalaman, yang disebabkan adanya gerakan anti Cina di wilayah ini. Bahkan pertengahan tahun 1946 disebutkan sekitar 5.000 orang Cina yang berasal dari Jawa dan Sumatera mengungsi dan mengalihkan bisnisnya ke Singapura, termasuk didalamnya sebanyak 3.000 orang Cina dari Palembang.¹⁰⁰

⁹⁸ Lindayanti, *op.cit.*,

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 425. Untuk melihat bagaimana realasi antara Singapura dengan Revolusi Indonesia, karya mutahir untuk tema ditulis oleh Yong Mung Cheong, *The Indonesian Revolution and Singapore Connection 1945-1949*, Leiden: VKI, 2003 diakses dari situs www.kitlv.nl. 3 Agustus 2007.

Fragmentaris dari sikap orang Cina dalam hubungannya dengan penguasa Republik Indonesia di Palembang bisa dilihat dari beberapa orang Cina yang bersimpati terhadap pemerintahan Republik, seperti yang diperlihatkan oleh beberapa orang Cina Palembang, diantaranya Theng A Suy serta Theng Lian Joo (Tong Djoe). Bahkan yang terakhir di Palembang adalah sebagai raja penyelundup. Karena peranannya dalam kegiatan perdagangan gelap antara Palembang-Singapura melalui jalur laut. Hubungan Tong Djoe dengan pemimpin Republik di Palembang seperti Gani sudah terjalin sejak masa pendudukan Jepang. Sedangkan beberapa orang Cina masih berpihak kepada mantan majikannya, terutama mereka yang pernah memperoleh kedudukan dan fasilitas istimewa dari Belanda seperti Kapiten Cina.

Dalam bidang politik, setelah Sukarno dan Hatta memproklamkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tentara Belanda (NICA) kemudian menduduki sebagian kota besar Indonesia. Pasukan Republik Indonesia didesak kembali ke Yogyakarta. Bulan April 1946, kira-kira delapan bulan sesudah proklamasi kemerdekaan, pemerintah RI yang berada di Yogyakarta mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan yang dilandaskan pada azas isu solid dan sistem pasif. Undang-undang ini menyebutkan bahwa warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli yang bertempat tinggal di Indonesia dan mereka yang bukan pribumi, sebagaimana kutipan dibawah ini:

“...orang-orang yang tidak dalam kelompok yang tersebut diatas, akan tetapi yang lahir di daerah-daerah teritorial Indonesia dan telah tinggal disana selama lima tahun terakhir berturut-turut, serta mereka yang telah berumur 21 tahun, dengan syarat orang-orang tersebut tidak menolak kewarganegaraan Indonesia karena menjadi warga negara lain...”¹⁰¹

Dari kutipan diatas, posisi orang Cina yang lahir sebelum penjajahan, terutama kelompok peranakan dengan “sistem pasif” secara otomatis menjadi warga negara Indonesia.

¹⁰¹ Leo Suryadinata, *op.cit.*, hal. 116.

Kewarganegaraan Indonesia yang diundangkan 1946 oleh kaum Republikan tidak secara menyeluruh menyentuh mayoritas orang Cina. Kebijakan liberal dalam bidang ini, tidak sejalan dengan persepsi sebagian besar masyarakat pribumi yang cenderung tidak mempercayai golongan minoritas Cina dan tetap menganggap mereka sebagai orang asing.

Menurut Suryadinata, alasan kebijakan diatas mungkin lebih didasarkan dari "segi obyektif", yaitu keadaan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia yang pada waktu sedang menghadapi kekuasaan penjajah Belanda sehingga mereka ingin menarik simpati dan dukungan ekonomi orang Cina untuk membantu perjuangan bagi kemerdekaan politik.¹⁰²

C. Hubungan Orang Cina dengan Belanda

Hubungan antara orang Cina di Palembang dengan Belanda pada awal kemerdekaan, agaknya memiliki nuansa yang berbeda, setidaknya bila bercermin dari hubungan yang terjalin sebelumnya. Di masa colonial, penempatan minoritas Cina sebagai kelompok *middleman* (pedagang perantara) telah menciptakan perasaan superior orang Cina terhadap pribumi. Akan tetapi kemampuan dan keleluasaan orang Cina dalam bidang perdagangan (ekonomi) disini mendapat fasilitas istimewa dari Belanda. Akan tetapi dari sisi sosial dan politis, dengan kebijakan Belanda yang mengkonsentrasikan mereka dalam satu pemukiman khusus, seperti munculnya Pecinan di berbagai kota besar di Indonesia, mengakibatkan menurunnya interaksi sosial mereka dengan penduduk pribumi. Untuk mempertegas kontrol penguasa kolonial terhadap kelompok Cina, maka diangkat pula kapiten Cina pada setiap kota yang memiliki komunitas Cina.

Pada revolusi kapiten Cina Palembang, Lie Sioe Sing merupakan salah seorang, yang barangkali bisa dikategorikan sebagai pihak yang menginginkan kembali kondisi sebelum revolusi. Hal ini terlihat ketika munculnya permasalahan menyangkut orang Cina di Palembang yang menjadi korban pada awal kemerdekaan. Posisi kapiten Cina di Palembang merupakan

¹⁰² *Ibid.*,

salah satu hal yang menjadi perdebatan di kalangan komunitas Cina di Palembang. Sebab sejak tanggal 13 April 1947 sesuai dengan hasil pertemuan Federasi Cina Perantauan di Singapura tentang perlunya penghapusan posisi kapiten Cina, yang diusulkan oleh Khe Cin yang bertujuan meniadakan dualisme kepemimpinan orang Cina di Palembang antara kapiten Cina dengan Konsulat Jenderal Cina di Singapura. Sebab mulai Januari 1946 secara resmi Cina Palembang berada dibawah kepengurusan Chung Hua Tsung Hui (Federasi Cina Perantauan).¹⁰³

Kalangan Cina totok menerima usulan untuk menghapuskan lembaga "kapiten Cina" serta mengakui adanya satu lembaga Cina perantauan. Sebaliknya Kapiten Cina Palembang, Lie Sioe Sing menolak usulan tersebut, dia berdalih bahwa persoalan kolonialisme adalah persoalan Indonesia-Belanda, sedangkan orang Cina berada di luar permasalahan itu. Baginya orang Cina Palembang yang berjumlah 40 ribu orang perlu seorang pemimpin, seorang Kapiten Cina yang diangkat oleh pemerintah, sedangkan Federasi Cina Perantauan hanya merupakan perwakilan orang-orang Cina dan tidak berada dalam struktur pemerintahan.¹⁰⁴

Beberapa orang Cina Palembang seperti Tong Joe, di mata Belanda sebagai pihak yang membuat masalah, karena kegiatan perdagangan gelapnya dan hubungan eratnya dengan kaum Republik telah mengacaukan kepentingan ekonomi Belanda. Bahkan untuk soal ini Belanda terpaksa mengambil tindakan dengan melakukan penangkapan terhadap kapal-kapal yang melakukan kegiatan penyelundupan seperti dialami oleh perusahaan kapal Tay Hock Goan Co.

Kejadian lain yang juga menimbulkan kecurigaan terhadap perilaku dagang orang Cina di Palembang, misalnya pada tanggal 21 Maret sampai tanggal 30 Maret 1947 gulden Belanda mengalami fluktuatif yakni dari 30 turun tajam menjadi 18 dan naik lagi menjadi 28, lalu turun kembali menjadi 20 dan kemudian balik ke angka 18. Pihak militer Belanda menuduh

¹⁰³ Lindayanti, *op.cit.*, hal. 428.

¹⁰⁴ *Ibid.*,

kejadian ini sebagai perbuatan manipulasi pedagang Cina untuk meraup laba yang lebih besar.¹⁰⁵

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 30.

BAB IV

PERUBAHAN SIKAP POLITIK DAN ORIENTASI EKONOMI ORANG CINA DI PALEMBANG PADA MASA REVOLUSI

A. Aksi kekerasan Anti Cina

Masa revolusi merupakan periode transisi pemerintahan yang ditandai dengan ketiadaan tertib hukum serta ketidakpastian bagi pelaku ekonomi, tak terkecuali bagi orang Cina yang mengendalikan perekonomian di Indonesia. Pada masa ini, orang Cina harus menghadapi dua penguasa yang saling berebut pengaruh baik secara politik maupun ekonomi, yakni antara pemerintah RI dan pemerintah Belanda.

Masa transisi dalam sebuah pemerintahan seringkali menimbulkan ketegangan sosial yang pada akhirnya bermuara kepada konflik antara pribumi dengan non pribumi (Cina), sebagaimana fenomena konflik SARA di beberapa wilayah Indonesia pada periode menjelang runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998, khususnya di pulau Jawa (Jakarta dan Solo).

Paralel dengan kondisi Indonesia menjelang runtuhnya kekuasaan orde baru, masa revolusi di berbagai tempat di Indonesia juga diwarnai dengan munculnya aksi kekerasan anti Cina sebagaimana dipaparkan oleh Remco Raben. Beberapa kasus kekerasan seperti yang terjadi di Bagan Siapiapi pada bulan Maret-Oktober 1946, yang memakan korban di pihak orang Cina diperkirakan berjumlah 100-200 orang. Kemudian aksi yang sama yang terjadi di Tangerang pada bulan Mei 1946 diperkirakan tidak kurang 1085 orang Cina terbunuh sedangkan ribuan lainnya menjadi pengungsi ke Batavia. Masih pada wilayah yang sama, yakni dalam skope yang lebih luas (Jawa Barat) pada bulan Juli-Agustus 1947 terjadi tindakan serupa. Di beberapa wilayah seperti Cirebon dan Majalengka orang Cina yang menjadi korban kekerasan berjumlah ratusan.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Remco Raben, *Anti-Chinese Violence in the Indonesian Revolution*, makalah di sampaikan dalam Konferensi dan Workshop Internasional, "Dekolonisasi dan Posisi Etnis Tionghoa Indonesia 1930-an s/d 1960-an, di selenggarakan oleh Jurusan FIS UNP-NIOD, Padang 18-21 Juni 2006.

Tidak terkecuali di Palembang masa revolusi juga diwarnai dengan terjadinya tindak kekerasan terhadap orang Cina. Sejauh ini hanya yang sedikit tulisan yang mengeksplorasi persoalan ini, satu-satunya yang cukup otoritatif yang berbicara mengenai peristiwa ini, adalah tulisan Lindayanti.¹⁰⁷ Secara umum tipe kekerasan anti Cina di Indonesia pada masa revolusi, menurut Twang Peck Yang dapat dibagi menjadi tiga periode. Periode pertama dimulai tak lama setelah proklamasi kemerdekaan dan mereda setelah kedatangan tentara sekutu, yang diboncengi tentara Belanda, dua periode lainnya menyusul pada aksi militer Belanda I tahun 1947 dan agresi militer II tahun 1948.¹⁰⁸

Dalam kasus di Palembang, bukanlah kerusuhan anti Cina yang terjadi melainkan tindakan kriminal biasa demikian menurut pendapat Djohan Hanafiah, seorang Sejarawan lokal. Beliau menyebut fenomena ini dengan sebutan "*Caklau*", istilah lokal untuk menyebut tindakan spontan masyarakat, terutama kelompok anak muda revolusioner yang merampok harta orang Cina, sebagaimana pendapatnya dibawah ini:

"Sebenarnya tidak ada kerusuhan anti Cina di Palembang pada awal kemerdekaan, yang muncul hanyalah tindak kriminal biasa, seperti *caklau* yang bersifat spontan yang dilakukan oleh para pemuda. Biasanya mereka mengambil (merampok) harta milik orang-orang Cina kaya. Tindakan ini dibenarkan sepanjang untuk kepentingan Republik. Dan biasanya ditujukan terhadap orang-orang Cina yang pro-Belanda."¹⁰⁹

Terlepas dari persoalan perbedaan persepsi menyangkut perspektif kekerasan yang menimpa orang Cina pada awal kemerdekaan di Palembang. Sebagaimana uraian sebelumnya, munculnya sikap anti Cina di Palembang dengan berbagai

¹⁰⁷ Lindayanti, "Komunitas Orang Cina di Palembang pada Awal Kemerdekaan Indonesia 1945-1950 dalam Ed Sedyawati dan Susanto Zuhdi (ed), *Arung Samudra, Persembahan Memperingati Sembilan Windu A.B. Lopian*, Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lemlit UI, 2001, hal. 421-433.

¹⁰⁸ Twang Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*, Yogyakarta: Niagara, 2005, hal. 187.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bp. Johan Hanafiah tanggal 29 Maret 2007 di Palembang.

implikasinya tidak terlepas dari perubahan konstelasi politik dan ekonomi di Indonesia. Pada periode ini orang Cina menghadapi dua kekuatan yang sama-sama menginginkan mereka menjadi bagiannya. Sedangkan mayoritas orang Cina yang bergelut dalam bidang perdagangan, tentunya lebih mementingkan dan mengamankan kepentingan ekonomi mereka.

Ambivalensi sikap orang Cina di Palembang membuat kelompok-kelompok radikal revolusioner dalam tubuh Republik Indonesia kerap kali menuduh mereka sebagai “kaki tangan NICA”. Mereka menghadapi pilihan yang teramat sulit: mendukung sepenuhnya Republik atau menerima kembali Belanda. Sedangkan mayoritas Cina - Palembang yang tergabung dalam beberapa organisasi mencoba bersikap “netral” terhadap konflik Indonesia-Belanda.¹¹⁰

Sikap oportunistik yang kadang diperlihatkan kelompok ini, tampak ketika mereka berusaha mencari perlindungan kepada pihak yang dianggap yang berkuasa. Kedatangan tentara sekutu juga mereka manfaatkan untuk tujuan ekonomi termasuk ketika peranan sekutu digantikan oleh tentara NICA. Transisi penarikan dan pemindahan sekutu selama kurang lebih setahun, mulai tanggal 22 Oktober 1945 sampai tanggal 9 November 1946, merupakan fase awal munculnya tindak kekerasan ini, terutama ketika saat itu Palembang terjerumus dalam pertempuran-pertempuran antara pihak tentara NICA dengan pejuang Republik, yang klimaksnya terjadi pada tanggal 1 Januari 1947, yang dikenal sebagai “pertempuran lima hari malam”.

Pada peristiwa ini kebanyakan orang Cina yang menjadi korban, berdasarkan laporan konsul Cina di Palembang tercatat 250 orang terbunuh, 1000 orang terluka, 600 orang hilang dan 900 orang kehilangan tempat tinggal. Dari jumlah tersebut diperkirakan 10% menjadi korban serangan militer udara Belanda, sedangkan sebagian besar dibunuh oleh pasukan Hizbullah, Napindo dan PKI. Sedangkan kerugian harta benda ditaksir mencapai \$5 juta dan 3,3 juta diantaranya dirampok perusuh.¹¹¹

¹¹⁰ Mestika Zed, Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003, hal. 497.

¹¹¹ Lindayanti, *op.cit.*, hal. 426.

B. Perubahan Sikap Politik Orang Cina

Pertempuran tahun baru 1947 di Palembang tampaknya mampu mengubah sikap politik kelompok-kelompok Cina Palembang. Sebagian dari tokoh Cina-Palembang yang berhasil lolos dari pertempuran dan menyelamatkan diri ke Singapura, mereka segera membentuk sebuah perhimpunan yang dinamakan *Himpunan Persahabatan Cina Palembang* (HPCP). Sedangkan mayoritas Cina Palembang lebih memilih bersikap netral ditengah suasana ketidakpastian.¹¹²

Akan tetapi ada beberapa yang mulai secara terang-terangan mendukung pihak Republik seperti yang dilakukan oleh CLU (*Chinese Labour Union*). Mereka melakukan aksi protes kepada pihak Belanda serta menuntutnya untuk membayar ganti rugi atas nyawa dan harta orang Cina yang hilang pada peristiwa awal Januari 1947. Meskipun sebenarnya korban orang Cina lebih banyak yang disebabkan oleh pihak Republik. Pemimpin CLU ini adalah Liem Djie Lan, seorang Cina peranakan yang dilahirkan di Palembang. Ia bertindak mewakili Cina-Palembang mengadakan pertemuan pada awal Februari 1947 untuk menuntut Belanda, namun permintaannya ditolak Belanda.¹¹³

Banyaknya orang Cina yang menjadi korban pada peristiwa Januari 1947 di Palembang, melahirkan solidaritas dari masyarakat Cina perantauan yang ada di Singapura. Hal ini terlihat dari respon kelompok ini dengan diadakannya Pertemuan Umum Cina Perantauan. Pertemuan diketahui pula oleh Lee Kong Chai (wakil kamar dagang Singapura), hasil perlu dibentuknya Asosiasi masyarakat perantauan yang berkedudukan di Singapura untuk menyelesaikan masalah peristiwa Palembang Januari 1947.

Namun pendirian *Pao Chiao Hui* (PCH) atau *Overseas Chinese Protection Association* tidak memuaskan, karena organisasi hanya mempermasalahkan perlindungan dalam hal perdagangan pada orang Cina terhadap serangan militer Belanda. PCH tidak pernah membicarakan permasalahan warga Cina yang menjadi korban peristiwa tersebut. Oleh sebab itu Tan

¹¹² Mestika Zed, *op.cit.*, hal. 498.

¹¹³ *Ibid.*, hal. 499.

Kah Kee dari Liga Demokrat mengirim telegram kepada Presiden Soekarno untuk menghentikan gerakan anti Cina di Palembang dan di daerah-daerah pedalaman.

Karena PCH dianggap tidak mampu menangani permasalahan Cina-Palembang, maka persoalan diambil Assosiasi Cina Perantauan di Nanyang (*Nan Chiao Tsung Hui-NCTH*), yang diketuai oleh Tan Kah Kee dengan anggotanya Lee Kong Chian dari SOIEA (The Singapore Overseas Chinese Importers-Exporters Association)¹¹⁴ dan Wan Yuang Xing dari Palembang, yang juga merupakan salah satu dari 5 anggota pengawas Impor-Ekspor Sumatera yang didirikan oleh pemerintah Republik.

Insiden Palembang juga mendapat respon dari media massa milik komunitas Cina, terlihat dari banyaknya protes, seperti yang dilakukan oleh harian *Sin Po*, yang terbit di Batavia tanggal 24 Januari 1947. Atas nama pemerintah Cina menyampaikan protes keras terhadap penguasa Republik dan Belanda untuk menyelesaikan Palembang serta meminta hal itu tidak akan terjadi lagi. Suara protes juga datang dari harian *Thien Sung Yit Po*, surat kabar milik kelompok Kuomintang, *Nan Chiao Jit Pao* (Komunis). Media massa menyebarkan berita untuk memboikot perdagangan dengan Belanda.

Sikap protes terhadap kekerasan Cina-Palembang, juga dilakukan oleh organisasi *Hooc Ho*, organisasi pengusaha hotel yang ada di Singapura. Mereka menyerukan pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda serta menolak menerima tamu yang turun dari kapal-kapal Belanda. Tindakan yang lebih konkret dilakukan oleh Assosiasi Cina Perantauan di Nanyang (*Nan Chiao Tsung Hui-NCTH*) yakni menuntu ke Belanda antara lain:

¹¹⁴ Lindayanti, *op.cit.*, hal. 427. SOIEA (The Singapore Overseas Chinese Importers-Exporters Association) di dirikan pada tanggal 15 Januari 1946, pendiri dan anggotanya bersala dari Cina Palembang, organisasi merupakan perkumpulan dagang Cina totok, anggotanya terdiri dari importer dan agen produk Indonesia, khususnya karet, tembakau, the dan gula. Bendharanya adalah seorang Cina Palembang pemilik usaha perkapalan Tay Hock Goan. Pada awalnya berdirinya mmeiliki anggota yang terdiri dari 100 pengusaha kemudian meningkat menjadi 239 anggota pada tahun berikutnya.

1. pihak Belanda mengganti semua kapal dan kargo yang musnah.
2. memberi kompensasi sehubungan terjadinya penembakan terhadap seorang pelaut yang bernama Chuan Ah Kwang.
3. menarik peraturan yang menghambat ekspor-impor.
4. memberi kompensasi atas kerugian yang diderita orang Cina.
5. menyatakan permintaan maaf kepada orang Cina secara keseluruhan.¹¹⁵

Bila semua tuntutan diatas tidak dipenuhi oleh Belanda , maka pedagang Cina akan melakukan boikot perdagangan dengan Belanda. Setelah melalui perundingan yang berlangsung alot, maka pada bulan Maret 1947 Belanda menyetujui beberapa hal, yakni pertama, menyetujui kompensasi atas kerugian yang diderita, kedua bersedia meminta maaf kepada orang Cina serta menjamin tidak akan terulang kejadian serupa.

C. Pola Dagang dan Peran Ekonomi Cina di Palembang

Perdagangan Cina di Palembang pada masa revolusi merupakan bentuk perdagangan gelap, yakni dalam bentuk aktifitas penyelundupan yang dilakukan oleh kelompok bisnis Cina selama periode ini. Twan Peck Yang mengkategorikan dalam dua jenis kegiatan perdagangan ini, pertama apa yang disebut dengan *dabangke*, yakni sekelompok pedagang kecil yang telah ada sebelumnya kemudian berkembang secara pesat pada masa pendudukan Jepang.

Perdagangan dalam tipe ini biasanya dikelola secara perorangan dan usahanya tidak terlalu besar. Meskipun skalanya kecil, barang-barang yang dijual memiliki harga jual yang tinggi seperti emas, permata dan opium. Operasi kelompok pedagang ini dilakukan pada daerah tertentu. Mereka melintasi jalan darat daerah perbatasan untuk menukar barang yang dimilikinya dengan para pelanggan di seberang. Yang kedua, tipe perdagangann *lianho* atau perusahaan perkongsian, model perusahaan telah beroperasi sejak sebelum perang dunia kedua,

¹¹⁵ *Ibid.*, hal. 428.

misalnya transportasi dengan nama Tiong Hoa Sing Loen Choen Kongsi, yang melayani rute domestik maupun manca negara. Tipe *dangbangke* merupakan ciri utama perdagangan penyelundupan yang beroperasi di Jawa.

Untuk jarak yang lebih dekat, para *dangbangke* akan memilih menuntun atau mengendarai sepeda selama berjam-jam membawa sepuluh kilogram berbagai macam barang, menghindari jalan-jalan utama untuk memperkecil kemungkinan dirampok. Kemudian untuk jarak yang lebih jauh mereka biasanya menggunakan kereta api.¹¹⁶ Kegiatan perdagangan biasanya dijalankan oleh kalangan totok, misalnya taipan Liem Sioe Liong, ia merupakan tipe pedagang *dabangke* yang beropersi antara Kudus-Semarang. Kedekatannya dengan kelompok Republik pada masa revolusi menjadikan usahanya berkembang hingga kita mengenalnya sebagai konglomerat pada masa orde baru.

Dalam konteks Palembang tipe perdagangan *dangbangke* juga dijalankan, para pedagang Cina dengan mitranya kaum Republik bekerjasama menerobos blokade ekonomi Belanda. Uniknya tipe perdagangan ini bertali-temali dengan perdagangan khas Palembang-*ngulo*- yang beroperasi di daerah ini, khususnya wilayah Pasemah. Bahkan pada masa agresi militer Belanda I tahun 1947, kegiatan perdagangan lintas-batas garis demarkasi Lahat-Pagar Alam dilewati oleh pedagang *ngulo*.

Sama halnya yang dilakukan oleh kelompok *dangbangke* di Jawa, para pedagang *ngulo* ini harus berjalan kaki berjam-jam karena jembatan yang menghubungkan ke pasar rusak akibat perang. Mereka membawa hasil bumi dari daerah pedalaman seperti kopi, beras, bawang merah, ternak dan lainnya serta menukarnya dengan barang-barang dagangan seperti minyak, sabun, rokok, garam, perkakas pertanian.¹¹⁷

Jangkauan pedagang *ngulo* tidak hanya terbatas di daerah Sumatera Selatan saja, bahkan mereka sampai ke Bengkulu dan Lampung. Mereka berani mengambil resiko karena

¹¹⁶ Twang Peck Yang, *op.cit.*, hal. 111-127, lihat juga Mestika Zed, *op.cit.*, hal 502-503.

¹¹⁷ Mestika Zed, *op.cit.*, hal. 504.

rute perdagangan mereka bukan rute perdagangan konvensional. Sebab jalan yang mesti dilewati antara lain hutan-belukar dan terkadang memiliki resiko besar seperti serangan binatang buas yang masih berkeliaran. Selain itu, mereka juga harus berhadapan dengan petugas keamanan yang selalu siaga di daerah-daerah yang batas demarkasi. Para pedagang *ngulo* harus membayar semacam “pajak tol” sebanyak dua kali di setiap daerah perbatasan. Kemudian mereka juga diwajibkan membawa “surat pas jalan” setiap kali hendak melewati pos jaga yang menghubungkan daerah-daerah perbatasan Onder Distrik Militer.

Kelompok pedagang *ngulo* yang bermodal besar pada umumnya adalah orang Cina-Palembang. Mereka biasanya menyewa beberapa “kuli bujang” untuk memanggul barang dagangan mereka. Mereka biasanya memborong barang-barang keperluan sehari-hari dalam jumlah besar. Sebagai contoh seorang pedagang Cina pada September 1947 membeli beras dalam jumlah besar dari pasar Pagar Alam, padahal saat itu rakyat sedang dilanda kelaparan.

Prototipe pedagang Cina tipe *ngulo* seperti Oun Jong Huat, pedagang yang dilahirkan di Palembang pada tahun 1902, sudah memulai usahanya pada masa pendudukan Jepang. Usahanya berkembang pesat setelah ia ditunjuk sebagai distributor minyak Plaju dan Sungai Gerong oleh Jepang. Sebagian dari minyak bumi dipergunakan untuk kepentingan militer dan sebagian lagi dijual untuk konsumsi masyarakat sipil. Posisinya adalah sebagai distributor sampai saat sektor ini dikendalikan oleh pihak Republik. Singkatnya ia melayani kebutuhan pasokan minyak sesuai dengan kemauan penguasa.

Jumlah pedagang kecil seperti pedagang *ngulo*, jumlahnya lebih banyak ketimbang tipe *lianho* di Palembang. Kelompok bisnis *lianho* biasanya menjadikan Singapura sebagai pusat kegiatan bisnis mereka. Kegiatan perdagangan mereka biasanya diorganisasi oleh SOCIEA dan PCH. Tidak kurang dari 50 orang pengusaha tipe *lianho* yang terjun dalam perdagangan gelap di Sumatera-Jawa. Dari 50 orang tersebut sekitar 64 % berasal dari Cina Palembang sedangkan sisanya 36 % berasal dari Jawa.

Pedagang *lianho* memiliki armada kapal yang terkait dengan kegiatan perdagangan Singapura-Palembang. Perubahan penting dalam sarana transportasi kapal Cina Palembang baru dimulai sejak periode revolusi. Sebelum perang dunia II, kapal yang mereka punyai hanya kapal jenis tongkang (berbobot 10-15 ton) dan kapal roda lambung (20-30 ton). Kapal-kapal ini merupakan milik pribadi dan bukan milik perkongsian. Hanya segelintir kapal milik perusahaan. Setelah Jepang kalah dari Sekutu, armada kapal Jepang diambil oleh Republik yang kemudian dijual kepada Cina Palembang. Selain itu, mereka merupakan juga membeli kapal dari otoritas Inggris di Singapura. Dari 20 pemilik kapal Cina yang beroperasi di Indonesia atau menggunakan Palembang sebagai pangkalan operasi 7 diantaranya dimiliki oleh Cina Palembang seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perusahaan Kapal Cina-Palembang

No.	Nama Pemilik	Perusahaan Kapal	Perusahaan Lain
1.	Ang Tiuw Bie	Kapal "Teluk 1-7"	Handel Mij Swan Liong
2.	Chek Goan	Chek Goan & Co. Ltd	Lian Tai & Co
3.	Chuan Ann (Tung Djoe)	Chuan Ann Shipping Co.	-
4.	Koh Teck Kin	Chiang Shipping Co. Ltd	Firma Koh Teck Kin
5.	Soe Hai Goan	The China Navigation Co. Ltd The Hong Hong Steamship, Co. Ltd The Straits Steamship Co. Ltd	Soe Hai Goan & Co
6.	Tan Ban San	Tong Seng Shipping Co.	Firman San Ho
7.	Tay Hock Goan	Kie Hock Shipping Co.	Firma Tay Hock Goan

Sumber: Mestika Zed, Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003, hal. 508.

Selain itu kelompok bisnis Cina yang sudah ada sejak sebelum perang dunia II NV *Hok Tong* (perusahaan eksportir karet). NV *Hok Tong* adalah satu perusahaan-perusahaan besar

yang dimiliki oleh kelompok Cina peranakan. Kelompok usaha ini sebelumnya bergerak dalam operasional pabrik gula di pulau Jawa yang kemudian melebarkan sayap bisnisnya ke pengembangan bisnis karet di Palembang. Sementara kelompok usaha *Hong Tong* memiliki basis bisnis karet di Palembang dengan kendali bisnisnya di Singapura. Anak-anak cabang perusahaan karet *Hok Tong* yang tersebar hingga Jambi, Pontianak dan Banjarmasin ikut terlibat dalam kegiatan perdagangan gelap pada masa ini.

Beberapa orang Cina yang terlibat kemitraan dengan penguasa Republik di Palembang dalam kegiatan perdagangan gelap ini, antara lain Wan Yuangxing dan Chuan Ann alias Toeng Djoe. Wan Yuangxing, adalah seorang Cina Peranakan yang terampil menggabungkan bidang bisnis dengan politik yang notabene dikuasai oleh totok. Sedangkan Tong Djoe selain dikenal karena kedekatannya dengan Gani, kerabatnya yang dikenal sebagai aktivis perkumpulan Cina yang pro-Republik. Kedua orang ini memiliki kedekatan dengan Gani sejak masa pendudukan Jepang. Bahkan mereka juga berhubungan dengan Ibnu Sutowo yang kelak pernah menjadi orang penting di Indonesia (PERTAMINA).

BAB V KESIMPULAN

Pasang surut hubungan antara pribumi dengan non pri seperti kelompok Cina dalam spektrum sejarah sosial di tanah air, senantiasa diwarnai dengan sikap simpati, antipati dan empati dari masyarakat kita. Sepanjang sejarah keberadaan kelompok etnik ini di Indonesia selalu tidak luput dari aroma kepentingan politik dan ekonomi serta implikasi sosial yang menjadikan mereka menjadi salah satu korbannya.

Tak terkecuali dengan Cina-Palembang, politik diskriminasi rasial yang diwariskan oleh Belanda ternyata berlanjut sampai ke periode selanjutnya, termasuk ketika semangat revolusi menjadi nafas hidup rakyat Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sikap politik orang Cina yang cenderung ambivalen pada awal kemerdekaan membuat posisi mereka berada dalam pusaran - tarik-menarik - antara mendukung pemerintah RI atau masih menjaga kesetiaan tradisionalnya kepada bekas majikan mereka (Belanda).

Ketidajelasan sikap politik orang Cina berakibat munculnya kecurigaan dari kaum Republik terutama kepada kelompok Cina yang bekerjasama dan dimanfaatkan oleh pihak Belanda pada periode ini. Sebagai akibat prasangka tersebut orang Cina menjadi korban dari tindakan kekerasan sosial seperti yang terjadi di Tangerang dan Kebumen 1946 serta di Palembang tahun 1947. Gerakan anti Cina di Palembang pada awal Januari 1947 menelan korban 250 orang terbunuh dan 600 orang dinyatakan hilang.

Peristiwa awal Januari 1947 di Palembang, yang dikenal dengan peristiwa pertempuran "Lima Hari Lima Malam" atau "Perang Kota 120 Jam Rakyat Palembang", kiranya menjadi salah satu momentum perubahan dalam sikap politik Cina Palembang dalam bersikap menghadapi penguasa setempat, baik Republik maupun Belanda. Jatuhnya korban di pihak Cina membuat terjadinya fragmentasi sikap dalam internal Cina Palembang. Sebagian bersikap pro-Republik seperti yang dilakukan oleh beberapa orang seperti Toeng Djoe sedangkan yang lainnya bersikap netral atau mungkin masih berusaha

meminta perlindungan kepada Belanda sebagaimana perilaku Kapiten Cina Palembang, Lien Sioe Sing.

Masa revolusi dalam perspektif Twang Peck Yang, merupakan periode keemasan aktivitas perdagangan gelap-*smuggling* yang menghubungkan poros perdagangan Palembang-Singapura. Dua tipe perdagangan yakni *danbang* dan *lianho*, merupakan pola dagang yang terlibat dalam kegiatan perdagangan gelap ini, yang satu lebih bercorak perseorangan yang lainnya lebih merupakan usaha perkongsian.

Kemitraan antara kelompok bisnis Cina dengan kelompok Republik semata-mata dilakukan dengan kepentingan yang berbeda. Bagi pihak Republik perdagangan gelap dilakukan untuk mendukung operasional kepentingan Republik untuk mempertahankan kemerdekaan, sedangkan bagi kelompok bisnis Cina ditujukan untuk kepentingan ekonomi mereka.

Pelajaran yang bisa diambil dari hasil penelitian diatas adalah tumbuh dan berkembangnya mental dagang yang dimiliki Cina tidak semata-mata karena warisan sejarah belaka. Bahwa kekuasaan politik penguasa dalam menentukan kemajuan perdagangan sekelompok etnik tertentu bukanlah premis yang kebenaran mutlak. Akan tetapi yang lebih utama adalah kultur dan perilaku orang-orang Cina dalam menjalani profesi yang memang disokong oleh landasan budaya mereka serta kemampuan untuk menangkap peluang dalam situasi apapun, termasuk dalam keadaan yang serba tidak menentu, dapat dijadikan sebagai contoh yang baik bagi peningkatan sektor ekonomi masyarakat kita seperti periode revolusi ini. Diskriminasi rasial warisan kolonial, hanya mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

- Ari, Kemas, *Masyarakat Tionghoa Palembang, Tinjauan Sejarah Sosial (1823-1945)*, Palembang: Forum Pengkajian Sosial Budaya, 2003.
- Abdullah, Makmun dkk, *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*, Jakarta: Depdikbud, Proyek IDSN, 1984/1985.
- Coppel, Charles, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, Jakarta: Sinar Harapan, 1994.
- Bigalke, Terry, "The Oral History Methode", dalam *Sejarah Lisan*, Jakarta: Lembaran Berita Arnas, No.9 Oktober, 1982.
- Djoned Poesponegoro, Marwati, *Sejarah Nasional Indonesia II*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terjemahaan Noegroho Notooesanto, Jakarta: UI Press, 1986.
- Hanafiah, Johan, *Melayu-Jawa, Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Handoko, T. Hani, "Tradisi (Manajemen) Dagang ala Tionghoa", dalam *Penguasa Ekonomi dan Sukses Pengusaha Tionghoa*, Yogyakarta: Lembaga Studi Realino, 1996.
- Iskandar. T, *amus Dewan*, Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka, 1986.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Koentjaraningrat, "Metode Penggunaan Data Pengalaman Individu" dalam Koentjaraningrat (ed), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Lohanda, Mona, *The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942*, Jakarta: Vasanty, Puspa, "Kebudayaan Orang Tionghoa di

Indonesia", dalam Koentjaraningrat (ed), *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1980.

Penerbit Djambatan, 2001.

Lembaga Studi Realino, *Penguasa Ekonomi dan Sukses Pengusaha Tionghoa*, Yogyakarta: Lembaga Studi Realino, 1996.

Peck Yang, Twan *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*, terjemahan Apri Danarto
Yogyakarta: Niagara, 2005, hal. 90-91.

Purwati, Retno, *Sejarah Perkembangan Pemukiman Masyarakat Cina di Palembang*, Palembang: Jurnal Arkeologi Balar Palembang, 2002.

Salim Peter dan Yani Salim, *Kamus Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1995.

Sedyawati, Edy dan Susanto Zuhdi (ed), *Arung Samudra, Persembahan Memperingati Sembilan Windu A.B. Lopian*, Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lemlit UI, 2001.

Sevenhoven, J.L, *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, terjemahaan Sugarda Purbakawartja, Jakarta: Bharata, 1971.

Soeryadinata, Leo, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: Grafitti Press, 1984.

—————, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986.

—————, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Nasional*, Jakarta: LP3ES, 1999.

Stibbe, D.G, *Encylopaediavan Nederlandsch-Indie*, Leiden: 'sGravenhage Jilid III, 1919.

Sulaiman, Satyawati, *He Archeology and History of West Sumatra*, Jakarta: Bulletin Penelitian Arkenas, 1997.

- Taim, Eko Asih Putriana, *Pemukiman Tepi Sungai di Kota Palembang*, Palembang: Jurnal Arkeologi Balar Palembang, 2002.
- Twan Djie, Twiem, *Perdagangan Perantara Distribusi Orang-Orang Cina di Jawa, Suatu Studi Ekonomi*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Wardoyo, T.S, *Tan Jin Sing dari Kapiten Cina sampai Bupati Yogyakarta*; Jakarta Gramedia, 1981.
- Wertheim, W. F. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Wibowo, I, *Harga yang Harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001.
- , *Retrospeksi dan Rekontekstualisasi, Masalah Cina*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999.
- Wolters, O.W, *The Fall of Sriwijaya in Malay History*, Singapura: Oxford University Press, 1970.
- Zed, Mestika, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003.
- , "The Dualistic Economy of Palembang in Late Colonial Period, Thomas J. Linblad (ed), *Historica Foundation of National Economy in Indonesia, 1890s-1990s*, North-Hollands Akademie van Wetenschappen Verhandeling, Afd Letterkunde, Nieuwe, dell 167, 1996.

LAMPIRAN : 1

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Hambali Hasan
Umur : 63 Tahun
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan : Pensiunan PNS, Pengurus Badan Musyawarah Adat Sumsel
Alamat : Palembang

2. Nama : Djohan Hanafiah
Umur : 65 Tahun
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan : Sejarawan, Anggota DPRD Kota Palembang
Alamat : Palembang

3. Nama : H.A Zawawie Said
Umur : 70 Tahun
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan : Ketua LVRI Kota Palembang
Alamat : Palembang

4. Nama : Badir Maulana
Umur : 70 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Bedahara LVRI Kota Palembang
Alamat : Palembang

5. Nama : Tjoa Kok Lim (Kohar)
Umur : 70 Tahun
Pendidikan : HIS
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Palembang

LAMPIRAN : 2

Sinopsis

Rakit yang Berubah Haluan : Perubahan Sikap Politik dan Orientasi Ekonomi Orang Cina di Palembang Pada Masa Revolusi, Suatu Kajian Sejarah Sosial.

Oleh:
Jumhari
Erric syah

Diskursus mengenai relasi antara kelompok etnik Cina di tanah air kita dengan masyarakat pribumi dan pemerintahan yang sedang berkuasa, senantiasa menarik untuk diperbincangkan terkait dengan kepentingan ekonomi dan sikap politik dimana mereka berada. Seolah menjadi takdir yang harus diterima manakala muncul krisis ekonomi ataupun politik yang bermuara pada munculnya konflik sosial. orang Cina acap kali menjadi sasaran dan tumbal kemarahan serta kekecewaan dari kelompok pribumi. Kelompok ini seolah menjadi sasaran tembak dan selalu menjadi pihak yang “dikambing hitamkan” terhadap berbagai ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat.

Masa revolusi merupakan periode yang penuh gejolak dan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi, tak terkecuali bagi orang Cina yang memegang kendali perekonomian di Indonesia. Pada masa ini, orang Cina yang bergelut di dunia bisnis dan perdagangan menghadapi dua penguasa yang saling berebut pengaruh baik secara politik maupun ekonomi, yakni antara pemerintah RI dan pemerintah Belanda yang berusaha kembali menegakkan politik imperialismenya di Indonesia. Posisi kelompok ini serba dilematis diantara pilihan sikap politik dan kepentingan ekonominya dimana mereka berada. Daerah Palembang merupakan salah satu medan pertarungan politik dan ekonomi diantara para penguasa, yang secara langsung berpengaruh pada eksistensi kelompok Cina pada masa ini. Hal

ini bisa dipahami mengingat Palembang sebagai kawasan ekonomis yang strategis di luar Jawa telah memiliki jaringan hubungan ekonomi yang bersifat lintas negara-transnasional dengan Singapura sebagai bandar transit di Asia Tenggara.

Masa transisi dalam sebuah pemerintahan sering kali menimbulkan ketegangan sosial yang pada akhirnya bermuara kepada konflik antara pribumi dengan non pribumi (Cina), sebagaimana sinyalemen Lindayanti mengenai konflik SARA di beberapa wilayah Indonesia pada periode menjelang runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998, khususnya di pulau Jawa (Jakarta dan Solo) serta di Palembang pada masa revolusi.

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ternyata berdampak luas, tidak saja menghapuskan kelompok pribumi dari penindasan kaum penjajah, akan tetapi juga memporak-porandakan bangunan sosial yang ada sebelumnya, seperti terhapusnya strata masyarakat kolonial berdasarkan ras, termasuk berubahnya posisi etnik Cina di Indonesia, yang semula merasa lebih tinggi kedudukannya ketimbang kelompok pribumi.

Pada masa kolonial Belanda dengan penerapan kebijakan politik segregasi sosial (*regering almanak* 1854) yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan kolonial. Dimana masyarakat Hindia Belanda dikelompokkan berdasarkan stratifikasi sosial yang timpang, kelompok warga kelas satu ditempati oleh orang-orang Eropa, kelompok kedua mereka yang disebut orang Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) termasuk Cina, Arab dan orang Asia lainnya, sedangkan mayoritas pribumi dalam strata yang paling bawah.

Perubahan konstelasi politik di Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945, tentunya berpengaruh pada kehidupan sosial politik dan ekonomi orang Cina di Indonesia, seperti identifikasi diri, sikap politik dan kepentingan ekonomi mereka. Persoalan identifikasi diri terhadap negara tempat mereka bermukim merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh orang-orang Cina perantauan, sebagaimana dikemukakan oleh Leo Suryadinata. Persoalan berikutnya muncul, meskipun orang Cina yang telah lama tinggal di Indonesia dan sudah meninggalkan identitas keciinaanya serta mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari masyarakat pribumi. Akan tetapi hal itu

bukan berarti dengan sendirinya, mereka sudah dianggap sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia.

Ambiguitas sikap politik orang Cina di Indonesia pada awal kemerdekaan, merupakan warisan sejarah sebagai akibat penerapan kebijakan politik kewarganegaraan yang bersifat *bipatride* (berkewarganegaraan ganda) yang menimpa mereka. Status kewarganegaraan Cina yang tinggal di Hindia Belanda berdasarkan asas *Ius Soli*, menurut Undang-Undang tentang Kawula Negara Belanda (*Wet op het Nederlandsch Oonderdaanschap*) tahun 1910, yang menyatakan orang Cina tinggal di Hindia Belanda merupakan kawula Belanda. Kebijakan ini muncul sebagai reaksi dari Undang-Undang Kebangsaan yang dikeluarkan pemerintahan Kaisar Cina pada tahun 1910, yang menganggap bahwa setiap anak yang lahir dari orang tua yang beretnik Cina secara otomatis berkebangsaan Cina (asas *Ius Sanguinis*). Dari sinilah bibit awal munculnya kontroversi terhadap etnik Cina Indonesia, yang akhirnya membuat mereka bersikap ragu dalam menentukan sikap politik mereka setelah kemerdekaan Indonesia.

Sikap politik orang Cina yang cenderung ambivalen pada awal kemerdekaan membuat posisi mereka berada dalam pusaran - tarik-menarik - antara mendukung pemerintah RI atau masih menjaga kesetiaan tradisionalnya kepada bekas majikan mereka (Belanda). Ketidakjelasan sikap politik orang Cina berakibat munculnya kecurigaan dari kaum Republik terutama kepada kelompok Cina yang bekerjasama dan dimanfaatkan oleh pihak Belanda pada periode ini. Sebagai akibat prasangka tersebut orang Cina menjadi korban dari tindakan kekerasan sosial seperti yang terjadi di Tangerang dan Kebumen 1946 serta di Palembang tahun 1947. Gerakan anti Cina di Palembang pada awal Januari 1947 menelan korban 250 orang terbunuh dan 600 orang dinyatakan hilang.

Peristiwa awal Januari yang lebih dikenal sebagai "Pertempuran Lima Hari Lima Malam" merupakan pertempuran yang terjadi pihak Republik dengan tentara NICA, kiranya telah mengubah sikap kelompok-kelompok Cina di Palembang. Sebagian tokoh masyarakat Cina Palembang yang lolos dari pertempuran tersebut banyak yang melarikan diri ke Singapura segera membentuk sebuah perhimpunan yang dinamakan

Himpunan Persahabatan Cina Palembang (HPCP). Sedangkan mayoritas kelompok Cina yang tinggal di Palembang bersikap netral ditengah ketidak pastian. Meskipun begitu ada beberapa segelintir kelompok Cina yang mulai bersikap pro Republik.

Para pengungsi Cina Palembang yang lari ke Singapura, menjadikan kota ini sebagai basis konsolidasi dan perlawanan mereka terhadap pemerintah Belanda. Singapura menjadi pilihan tepat bagi kelompok pelarian Cina Palembang, selain sebagai kota pelabuhan- bandar perdagangan- terpenting di wilayah perairan Malaka, kota ini juga berada diluar kontrol kekuasaan Belanda. Peristiwa tahun 1947 juga memunculkan bentuk kerja sama antara penguasa dengan pedagang Cina, antara pemerintahan Republik dengan pengusaha Cina yang sebagian dari kaum *totok* selama masa revolusi, seperti tercermin dalam bentuk penyelundupan-penyelundupan (perdagangan gelap) yang mempertautkan kepentingan mereka.

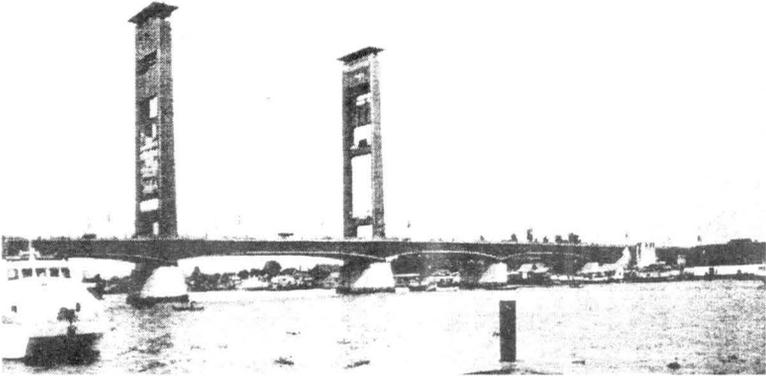
Masa revolusi dalam perspektif Twang Peck Yang, merupakan periode keemasan aktivitas perdagangan gelap-*smugling*- yang menghubungkan poros perdagangan Palembang-Singapura. Dua tipe perdagangan yakni *danbang* dan *lianho*, merupakan pola dagang yang terlibat kegiatan perdagangan gelap ini, yang satu lebih bercorak perseorangan yang lainnya lebih merupakan usaha perkongsian.

Kemitraan antara kelompok bisnis Cina dengan kelompok Republik semata-mata dilakukan dengan kepentingan yang berbeda, bagi pihak Republik perdagangan gelap dilakukan untuk mendukung operasional kepentingan Republik untuk mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan bagi kelompok bisnis Cina ditujukan untuk kepentingan ekonomi mereka.

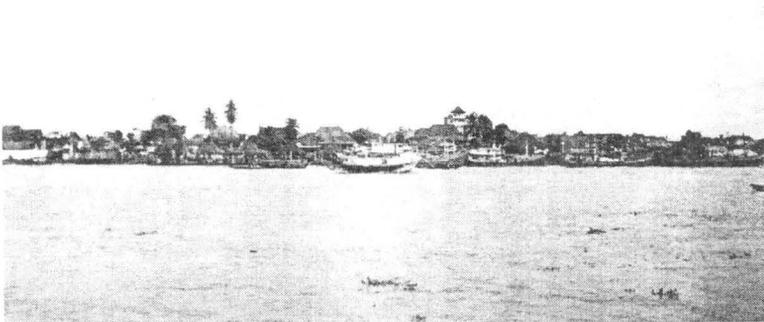
Kajian ini merupakan upaya penulis untuk memberikan gambaran awal menyangkut realitas sosial politik dan ekonomi orang Cina di Palembang pada masa revolusi sehubungan dengan terjadinya transisi dan transformasi kekuasaan pemerintahan serta implikasinya terhadap orang Cina di daerah ini. Selain itu, penulisan sejarah lokal dengan tema di atas perlu dilakukan, di tengah minimnya literatur yang mengangkat persoalan minoritas Cina di Palembang dalam konteks historiografi lokal maupun nasional.

LAMPIRAN : 3

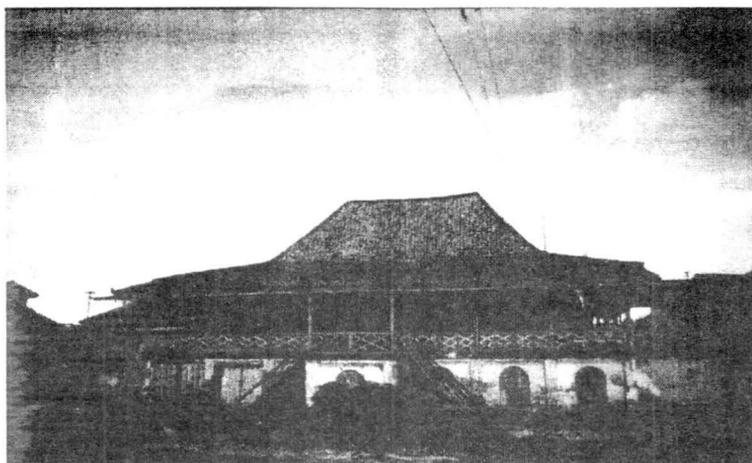
LAMPIRAN FOTO



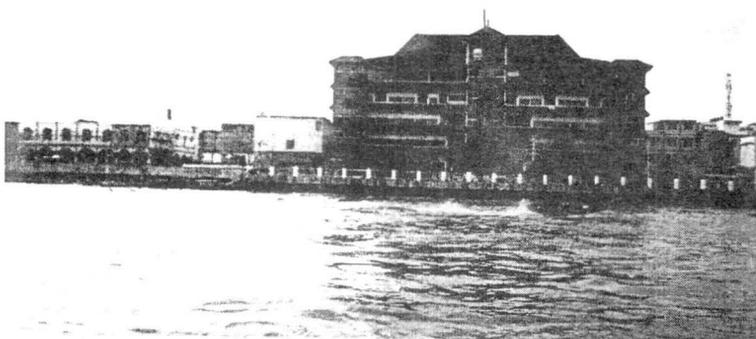
Jembatan Sungai Musi yang merupakan Land Mark kota Palembang



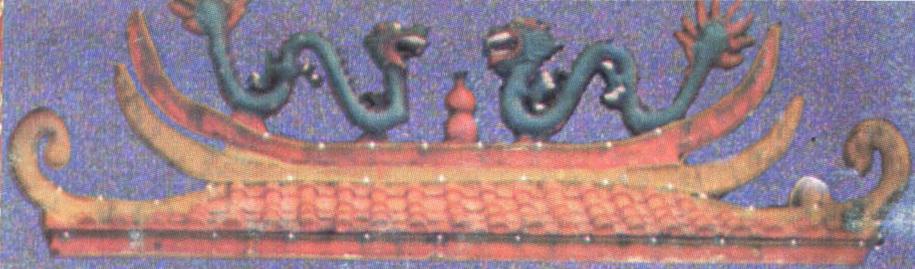
Kampung Cina Palembang di 7 Ulu dilihat dari seberang sungai



Rumah Kapiten Cina Palembang di Kampung 7 Ulu



Pasar 16 Ilir Palembang yang berada disamping Jembatan Sungai Musi



Perpustakaan
Jenderal
3
J

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL PADANG
Jl. Raya Belimbing No.16A, Kecamatan Kuranji Padang
Telp/Fax: (0751)496181